



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2014



Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



SMA/SMK/MA/MAK

XI

Semester 2

Hak Cipta © 2014 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang

Milik Negara
Tidak Diperdagangkan

Disklaimer: Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.--

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.

xii, 96. : illus. ; 25 cm.

Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI

ISBN (jilid lengkap)

ISBN (jilid 2)

1. Pendidikan Kewarganegaraan -- Studi dan Pengajaran

I. Judul

II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

370.11P

Kontributor Naskah : **Yusnawan Lubis & Mohamad Sodeli**

Penelaah :

Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud

Cetakan ke-1 2014

Disusun dengan huruf Times New Roman, 11 pt

Kata Pengantar

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar.....	vii
Keunggulan Buku.....	viii
Bab 6 : Menyibak Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran\ Kewajiban Warga Negara.....	1
A. Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	2
1. Makna Hak Warga Negara.....	2
2. Makna Kewajiban Warga Negara.....	6
B. Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara.....	8
1. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara.....	8
2. Kasus Peningkaran Kewajiban Warga Negara.....	12
Refleksi.....	14
Rangkuman.....	14
Penilaian Diri.....	15
Praktik Belajar Kewarganegaraan.....	16
Uji Kompetensi Bab 6.....	17
Bab 7 : Menatap Tantangan Integrasi Nasional.....	18
A. Mewaspadaikan Ancaman Terhadap Integrasi Nasional.....	19
1. Ancaman Militer.....	20
2. Ancaman Non-Militer.....	23
B. Strategi Untuk Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun Integrasi Nasional.....	28
1. Strategi dalam Mengatasi Ancaman Militer.....	28
2. Strategi dalam Mengatasi Ancaman Non-Militer.....	30
Refleksi.....	35
Rangkuman.....	36
Penilaian Diri.....	37

Praktik Belajar Kewarganegaraan.....	38
Uji Kompetensi Bab 7.....	40
Bab 8 : Menelusuri Dinamika Kehidupan Bernegara dalam Konteks Geopolitik Indonesia.....	41
A. Hakikat Konsep Geopolitik.....	42
1. Pengertian Geopolitik.....	42
2. Konsep Geopolitik Indonesia.....	44
3. Konsep Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia.....	47
B. Kehidupan Bernegara dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).....	53
1. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).....	53
2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	55
Refleksi.....	59
Rangkuman.....	60
Penilaian Diri.....	61
Praktik Belajar Kewarganegaraan.....	62
Uji Kompetensi Bab 8.....	63
Bab 9 : Mencermati Potret Budaya Politik Masyarakat Indonesia...	64
A. Hakikat Budaya Politik.....	65
1. Pengertian Budaya Politik.....	65
2. Klasifikasi Budaya Politik.....	67
B. Karakteristik Budaya Politik Masyarakat Indonesia.....	72
C. Hakikat Kesadaran Politik.....	73
1. Makna Kesadaran Politik.....	73
2. Mekanisme Sosialisasi Budaya Politik.....	75
D. Contoh Budaya Politik Partisipan.....	80
1. Bentuk-bentuk Budaya Politik Partisipan.....	80

2. Penerapan Prinsip Partisipasi Warga Negara dalam Kehidupan Politik.....	83
Refleksi.....	84
Rangkuman.....	84
Penilaian Diri.....	85
Praktik Belajar Kewarganegaraan.....	86
Uji Kompetensi Bab 9.....	87
Indeks.....	88
Glosarium.....	89
Daftar Pustaka.....	93

Daftar Gambar

Gambar 6.1	: Contoh perwujudan hak dan kewajiban warga negara.....	1
Gambar 6.2	: Pelantikan pejabat negara.....	5
Gambar 6.3	: Salah satu bentuk perwujudan kewajiban warga negara.....	6
Gambar 6.4	: Anak jalanan merupakan golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa menikmati haknya secara utuh.....	9
Gambar 7.1	: Salah satu pesawat tempur yang digunakan Belanda ketika melakukan Agresi Militer kepada Indonesia.....	21
Gambar 7.2	: Para Pahlawan Revolusi yang menjadi korban akibat Pemberontakan PKI.....	22
Gambar 7.3	: Tindakan anarkis menjadi ancaman bagi Bangsa Indonesia dalam bidang politik.....	24
Gambar 7.4	: Perwujudan kemanunggalan TNI/Polri dan rakyat....	29
Gambar 7.5	: Pertanian merupakan potensi besar bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman globalisasi ekonomi.....	33
Gambar 8.1	: Pembacaan Teks Proklamasi Oleh Ir. Soekarno.....	41
Gambar 8.2	: Frederich Ratzel.....	42
Gambar 8.3	: Bangsa Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah dan suku bangsa.....	46
Gambar 8.4	: Slogan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.....	48
Gambar 8.5	: Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.....	49

Gambar 8.6	:	Peta perbatasan RI-Malasia di Nunukan.....	51
Gambar 8.7	:	Keindahan alam menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.....	58
Gambar 9.1	:	Musyawarah antaranggota masyarakat.....	64
Gambar 9.2	:	Aksi unjuk rasa.....	70
Gambar 9.3	:	Suasana komunikasi antara orang tua dan anak.....	76
Gambar 9.4	:	Diskusi kelas sebagai salah satu pengembangan budaya politik di sekolah.....	77
Gambar 9.5	:	Media cetak merupakan salah satu sarana sosialisasi budaya politik.....	80
Gambar 9.6	:	Pemilu merupakan salah satu bentuk budaya politik partisipan.....	82

Keunggulan Buku

Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini merupakan buku pegangan dalam proses pembelajaran. Buku ini banyak sekali manfaatnya bagi peserta didik dan guru. Bagi peserta didik, buku ini akan mengantarkan mereka memperoleh wawasan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik. Sedangkan bagi guru, buku ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan proses pembelajaran baik di dalam maupun di lingkungan sekolah.

Buku ini merupakan jawaban atas tuntutan buku pelajaran yang berkualitas, yaitu buku pelajaran yang tidak hanya memaparkan materi, akan tetapi membelajarkan siswa tentang materi. Buku ini menmgembangkan kompetensi kewarganegaraan kalian melalui pendekatan *scientific* dimana melalui buku ini dalam proses pembelajaran kalian didorong untuk selalu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan.

Buku ini disusun berdasarkan kurikulum 2013. Materi yang disajikan dalam buku ini sesuai dengan standar isi yang ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, serta Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Materi disajikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh kalian dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis kalian sekolah menengah atas.

Buku ini dikemas secara sistematis dan menarik serta ditujukan untuk meningkatkan kreatifitas kalian. Bahasa yang dipergunakan merupakan bahasa yang mudah dipahami oleh kalian. Dengan kata lain, bahasa yang dipergunakan bukanlah bahasa yang kaku, tetapi bahasa yang fleksibel serta bersahabat dengan kalian.

Apa saja yang terdapat dalam buku ini? Di dalam buku ini disajikan berbagai macam rubrik yang mendorong kalian untuk aktif dalam setiap rangkaian proses pembelajaran. Adapun sistematika yang terdapat dalam buku ini diantaranya sebagai berikut:

1. **Pengantar.** Bagian ini terdapat pada awal setiap bab yang berfungsi memberikan gambaran awal mengenai materi pembelajaran yang akan kalian pelajari. Pada bagian ini kalian akan disuguhi gambar atau lagu yang tentunya akan semakin mendorong kalian untuk lebih tahu lagi materi yang dipelajari pada bab tersebut.

2. **Materi Pembelajaran.** Bagian ini berisi paparan materi pembelajaran yang harus kalian pelajari. Materi pembelajaran disajikan dengan menarik yang didukung oleh gambar-gambar yang relevan serta contoh-contoh yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Materi pembelajaran ini dilengkapi dengan rubrik *Info Kewarganegaraan* yang berisi tentang informasi-informasi tambahan yang tentunya akan memperluas cakrawala berpikir kalian. Selain itu juga terdapat rubrik *Penanaman Kesadaran Berkonstitusi*, yang berisi tentang nilai-nilai yang sifatnya penting dan mendasar yang akan mengarahkan kalian dalam pergaulan di berbagai lingkungan kehidupan.
3. **Tugas Mandiri dan Kelompok.** Bagian ini mengajak kalian berlatih baik secara mandiri atau berkelompok untuk menyelesaikan berbagai tugas dengan cara membaca berbagai literatur/buku, menganalisis suatu kasus, melakukan pengamatan terhadap berbagai peristiwa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar serta melakukan wawancara dengan para tokoh masyarakat atau aparatur negara.
4. **Refleksi.** Melalui bagian ini kalian diajak untuk mengevaluasi diri serta merenungkan apa saja yang telah kalian berikan atau lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara.
5. **Rangkuman.** Untuk mempermudah kalian dalam memahami materi pembelajaran, buku ini juga dilengkapi dengan rangkuman yang berisi ringkasan materi pembelajaran dalam satu bab.
6. **Uji Kompetensi.** Bagian ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana kompetensi yang telah kalian kuasai setelah mempelajari materi pembelajaran pada satu bab dengan menjawab berbagai soal yang terdapat dalam bagian ini.
7. **Penilaian Sikap.** Bagian ini untuk mengukur kesesuaian sikap dan perilaku kalian sebagai warga negara yang baik. Pada bagian ini kalian diajak untuk menilai diri sendiri, memberikan argumen atas nilai yang kalian tetapkan serta mengklarifikasi nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat at melalui wacana yang dibaca.
8. **Praktik Belajar Kewarganegaraan.** Untuk melatih kecakapan kalian dalam mengolah potensi berpikir kritis, pada bagian ini kalian akan diajak untuk mengerjakan seperangkat tugas untuk meningkatkan keterampilan kalian sebagai warga negara. Tugas-tugas tersebut dikemas dalam bentuk penelitian sederhana, analisis kasus, debat, menulis artikel dan bermain peran atau simulasi.
9. **Indeks.** Bagian ini berisi istilah-istilah dan nama tokoh-tokoh yang penting untuk diketahui oleh kalian.

10. Glosarium. Bagian ini melengkapi buku supaya kalian tidak bingung ketika menemukan berbagai kata asing atau kata yang sulit dipahami, sehingga mempermudah kalian untuk memahami materi secara keseluruhan.

Dengan membaca buku ini, cakrawala berpikir kalian sebagai warga negara tentunya akan semakin luas serta kompetensi yang dimiliki juga akan semakin bertambah banyak dan baik kualitasnya.



INDONESIA RAYA

G=do, 4/4

Pencipta: W.R Supratman

Indonesia tanah airku,
Tanah tumpah darahku,
Di sanalah aku berdiri,
Jadi pandu ibuku.

Indonesia kebangsaanku,
Bangsa dan tanah airku,
Marilah kita berseru,
Indonesia bersatu.

Hiduplah tanahku,
Hiduplah neg'riku,
Bangsaku, Rakyatku, semuanya,
Bangunlah jiwanya,
Bangunlah badannya,
Untuk Indonesia Raya.

Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Tanahku, negriku yang kucinta
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya.

BAB

6

Menyibak Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Selamat ya, kalian saat ini sudah memasuki pembelajaran pada semester genap di kelas XI. Semester ini sangat menentukan langkah kalian untuk bisa naik ke kelas XII. Nah, di semester genap ini materi pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan semakin memberikan tantangan kepada kalian untuk senantiasa belajar dengan penuh kesungguhan.

Pada awal semester genap ini, kalian akan diajak untuk menganalisis kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban merupakan dua istilah yang tentunya sering kalian dengar. Dua istilah tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Setiap orang dapat menikmati haknya, setelah kewajibannya dipenuhi. Setiap orang boleh menuntut haknya, setelah ia selesai menunaikan kewajibannya. Dengan kata lain, kita harus mendahulukan kewajiban dibandingkan dengan hak. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kita? Coba kalian amati gambar 6.1 di bawah ini.



Sumber: www.antarafoto.com dan www.theglobejournal.com

Gambar 6.1 Contoh perwujudan hak dan kewajiban warga negara.

Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar di atas? Tentu saja peristiwa yang terdapat dalam gambar di atas sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa tersebut merupakan perwujudan hak dan kewajiban warga negara. Peristiwa tersebut merupakan contoh perwujudan hak warga negara di

bidang politik, serta pemenuhan kewajiban warga negara dalam bidang fiskal atau perpajakan.

Hak dan kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya meliputi berbagai dimensi kehidupan, seperti dalam bidang politik, hukum, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan negara. Hak seorang warga negara harus dipenuhi oleh pemerintah dan warga negara lainnya. Selain itu pula, seorang warga negara tentu saja memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya. Akan tetapi pada saat ini sering sekali terjadi kasus pelanggaran hak warga negara, misalnya seorang warga negara yang mempunyai hak pilih tidak tercantum dalam daftar pemilih, sebuah rumah sakit menolak merawat warga negara yang sakit karena tidak mempunyai biaya, dan sebagainya. Begitu juga tidak sedikit warga negara yang mengingkari kewajiban yang harus dipenuhinya, misalnya tidak membayar pajak, tidak berperan serta kegiatan siskamling, dan sebagainya.

A. Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara



1. Makna Hak Warga Negara

Kalian tentunya selalu mendapatkan kasih sayang dari orang tua kalian. Salah satu bentuk kasih sayang orang tua kalian adalah dengan memenuhi semua keperluan kalian. Begitu pula ketika di sekolah, kalian mendapatkan ilmu pengetahuan dari pembelajaran yang dilakukan bersama guru. Nah, dua hal itu adalah contoh dari hak kalian sebagai warga negara.

Hak merupakan semua hal yang harus kalian peroleh atau dapatkan. Hak bisa berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan, misalnya seorang pegawai berhak mendapatkan upah, apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Pada pembajaran di bab pertama, kalian sudah diperkenalkan dengan konsep hak asasi manusia. Menurut kalian sama tidak maknanya dengan konsep hak warga negara? Untuk mengetahui jawabanya, coba kalian cermati uraian materi berikut ini.

Hak asasi manusia adalah *hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia*. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia, akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara, misalnya hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak asasi warga negara Indonesia, sehingga tidak berlaku bagi setiap orang

yang bukan warga negara Indonesia.

Apasaja hak warga negara Indonesia itu? Menurut Jimly Asshiddiqie dalam artikelnya yang berjudul *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis (2007)*, Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Setelah ketentuan tentang hak asasi manusia diadopsikan secara lengkap dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengertian tentang hak asasi manusia dan hak asasi warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian hak konstitusional yang dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, setiap warga negara Indonesia memiliki juga hak-hak hukum yang lebih rinci dan operasional yang diatur dengan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah. Hak-hak yang lahir dari peraturan di luar undang-undang dasar disebut hak-hak hukum, bukan hak konstitusional.

Dengan demikian dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa konsep hak warga negara memiliki cakupan sangat luas. Hak tersebut meliputi hak asasi manusia, hak konstitusional, dan hak legal/hukum.

Sekaitan dengan hal di atas, setiap warga negara Indonesia tentunya mempunyai ketiga jenis hak warga negara tersebut. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari kedudukan setiap warga negara Indonesia yang dianggap penting oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu manusia yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia. Penduduk Indonesia, apakah berstatus sebagai warga negara Indonesia atau bukan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dasar yang diakui universal. Prinsip-prinsip hak asasi manusia itu berlaku pula bagi setiap individu warga negara Indonesia. Bahkan, di samping jaminan hak asasi manusia itu, setiap warga negara Indonesia juga diberikan jaminan hak konstitusional dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di samping itu, terdapat pula ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku bagi warga negara atau setidaknya bagi warga negara diberikan kekhususan atau keutamaan-keutamaan tertentu, misalnya, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan dan lain-lain yang secara bertimbal balik menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memenuhi hak-hak itu khusus bagi warga negara Indonesia. Artinya, Negara Republik Indonesia tidak wajib memenuhi tuntutan warga negara asing untuk bekerja di Indonesia ataupun untuk

Info Kewarganegaraan

Secara umum jaminan hak warga negara secara konstitusional di atur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mendapatkan pendidikan gratis di Indonesia. Hak-hak tersebut dikategorikan sebagai hak warga negara yang meliputi:

- a. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga negara Indonesia saja. Misalnya:
 - 1) hak yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan *setiap Warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan;*
 - 2) Pasal 27 ayat (2) menyatakan *tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;*
 - 3) Pasal 27 ayat (3) berbunyi *setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara;*
 - 4) Pasal 30 ayat (1) berbunyi *tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara;*
 - 5) Pasal 31 ayat (1) menentukan *setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*
- b. Hak asasi manusia tertentu yang meskipun berlaku bagi setiap orang, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, khusus bagi Warga negara Indonesia berlaku keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya, Pasal 28D ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan, “Setiap orang berhak untuk bekerja....”. Namun, negara dapat membatasi hak orang asing untuk bekerja di Indonesia. Misalnya, turis asing dilarang memanfaatkan visa kunjungan untuk mendapatkan penghidupan atau imbalan dengan cara bekerja di Indonesia selama masa kunjungannya itu.
- c. Hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan, seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota, Kepala Desa, Hakim Konstitusi, Hakim Agung, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, anggota lembaga permusyawaratan dan perwakilan yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Dewan Gubernur Bank Indonesia, anggota komisi-komisi negara, dan jabatan-jabatan lain yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat.



Sumber: www.bkn.go.id

Gambar 6.2 Pelantikan pejabat negara.

- d. Hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu, seperti tentara nasional Indonesia, polisi negara, jaksa, pegawai negeri sipil beserta jabatan-jabatan struktural dan fungsional dalam lingkungan kepegawaian, dan jabatan-jabatan lain yang diisi melalui pemilihan. Semua jabatan yang dimaksud di atas hanya berlaku dan hanya dapat diduduki oleh warga negara Indonesia sendiri sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3).

Tugas Mandiri 6.1

Nah setelah membaca uraian materi di atas, coba kalian baca kembali UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian kelompokkan hak-hak warga negara yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedalam beberapa kategori yang terdapat dalam tabel di bawah ini.

Kategori	Jenis Hak Warga Negara	Pasal
Agama	<ul style="list-style-type: none"> Hak memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 29 ayat (2)
Politik, Hukum dan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">
Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">
Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">

2. Makna Kewajiban Warga Negara

Coba kalian amati gambar di bawah ini.



Sumber: www.minfaang.blogspot.com dan gmsrw12.blogspot.com

Gambar 6.3 Salah satu bentuk perwujudan kewajiban warga negara.

Dua peristiwa di atas memberikan gambaran bahwa selain mendapatkan hak, setiap orang juga mempunyai kewajiban. Kalian tentunya juga mempunyai kewajiban. Sebagai seorang anak, kalian harus melaksanakan perintah orang tua, misalnya membantu membersihkan lingkungan rumah. Sebagai seorang pelajar, kalian dituntut untuk mematuhi tata tertib sekolah, misalnya melaksanakan tugas piket kebersihan. Sebagai anggota masyarakat, kalian juga harus mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, misalnya ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Begitu pula sebagai warga negara, kalian juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan semua ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya membayar pajak.

Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana di atur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi?

Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban hak asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang, akan tetapi meskipun demikian konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas, karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan, sedangkan kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia saja, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut.

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya, dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah, setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita serta perjuangkan apa yang menjadi hak kita. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera.

mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu, sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas.

Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh banyak terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Tugas Mandiri 6.2

Setelah membaca uraian materi di atas, coba kalian baca kembali UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian identifikasi kewajiban-kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tuliskan hasil identifikasimu dalam tabel dibawah ini. Infomasikan temuanmu pada teman-teman yang lain.

No	Jenis Kewajiban Warga Negara	Pasal
1	Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan	27 ayat (1)
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

B. Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara



1. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

Kalian tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga kalian pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan kepada kalian. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung, karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah

satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara, misalnya pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka bisa saja menjadi anak jalanan.



Sumber: [www. http://gmsrw12.blogspot.com](http://gmsrw12.blogspot.com)

Gambar 6.4 Anak jalanan merupakan golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa menikmati haknya secara utuh.

Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia, penyebabnya bisa dari pemerintah ketika program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang malas untuk bekerja atau tidak mempunyai keterampilan, sehingga mereka hidup di garis kemiskinan.

Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi di negara kita misalnya:

- a. Proses penegakkan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadinya kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”, belum sepenuhnya dilaksanakan.
- b. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, padahal Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 mengamanatkan bahwa *tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*.

- c. Semakin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya, padahal Pasal 28 A – 28 J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin keberadaan Hak Asasi Manusia.
- d. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, padahal Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa *negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*.
- e. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya secara sepenuhnya amanat Pasal 31 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*.
- f. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD/DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya.

Contoh-contoh yang diuraikan di atas membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara itu dikarenakan adanya kelalaian dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal-hal tersebut apabila tidak segera diatasi dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Tugas Kelompok 6.1

Bacalah kasus di bawah ini bersama teman sebangkumu.

Banyaknya Kasus Putus Sekolah Di Indonesia

Faktor ekonomi menjadi faktor penyebab yang paling dominan putus sekolah. Kenyataan itu dapat dilihat dari tingginya angka rakyat miskin di Indonesia yang anaknya tidak bersekolah atau putus sekolah karena tidak ada biaya. Kurangnya ekonomi orang tua yang dikarenakan tidak adanya penghasilan yang tetap/tidak adanya pekerjaan, kurangnya minat untuk meraih pendidikan/ mengenyam pendidikan dari anak didik itu sendiri, karena faktor lingkungan baik itu pergaulan sehari-hari dengan teman sebaya maupun lingkungan yang lain, kurangnya motivasi dan pengawasan orang tua yang disebabkan karena orang tua tidak pernah mengenyam pendidikan dan tidak memahami arti pentingnya pendidikan bagi kehidupan bangsa dan bernegara juga merupakan penyebab kasus anak putus sekolah.

Anak putus sekolah juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu faktor dari dalam diri anak putus sekolah disebabkan malas untuk pergi sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, sering dicemooh karena tidak mampu membayar kewajiban biaya sekolah. Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu adalah peranan lingkungan. Karena pengaruh teman sehingga ikut-ikutan diajak bermain seperti play station sampai akhirnya sering membolos dan tidak naik kelas, prestasi di sekolah menurun dan malu pergi kembali ke sekolah. Anak yang kena sanksi karena mangkir sekolah sehingga kena droup out. Faktor eksternalnya yaitu faktor keluarga dan lingkungan. Dalam keluarga miskin cenderung timbul berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini sehingga mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan mengikuti pelajaran, kurangnya perhatian orang tua cenderung akan menimbulkan berbagai masalah. Makin besar anak perhatian orang tua makin diperlukan, dengan cara dan variasi dan sesuai kemampuan. Kenakalan anak adalah salah satu penyebabnya adalah kurangnya perhatian orang tua, hubungan keluarga tidak harmonis dapat berupa perceraian orang tua, hubungan antar keluarga tidak saling peduli. Keadaan ini merupakan dasar anak mengalami permasalahan yang serius dan hambatan dalam pendidikannya sehingga mengakibatkan anak mengalami putus sekolah.

Pendidikan murah atau gratis yang banyak dijanjikan dan diinginkan masyarakat, memang akan membantu jika ditinjau secara faktor ekonomi, namun kebijakan ini juga harus ditunjang dengan kebijakan yang lain untuk menyelesaikan faktor-faktor penyebab putus sekolah lainnya. Karena faktor ekonomi bukan penyebab satu-satunya putus sekolah.

Sebagai warga Negara Indonesia tentunya akan merasa cemas dengan adanya kasus putus sekolah ini. Pemerintah seharusnya lebih tegas lagi dalam menyikapi masalah ini. Dan begitu juga dengan orangtua dan guru-guru seharusnya memberikan motivasi dan mengawasi peserta didik dan anak-anaknya.

Sumber: <http://nofiputriaw.wordpress.com/2013/07/11>

Setelah membaca kasus di atas diskusikanlah dengan teman sebangkumu pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

- a. Mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah?
- b. Adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah? Apabila ada, apa saja faktor tersebut?
- c. Apakah upaya pemerintah sudah optimal untuk mengatasi masalah ini? Kemukakan indikator optimal dan tidak optimalnya.
- d. Selain pemerintah, siapa lagi yang bertanggungjawab untuk mengatasi masalah ini? Apa saja peran yang bisa ditampilkannya?
- e. Apa solusi yang kalian ajukan untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana starteginya supaya solusi itu berhasil?
- f. Kemukakan bentuk pelanggaran hak warga negara yang pernah terjadi di daerahmu. Serta bagaimana solusi untuk menyelesaikannya?

2. Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Kalian tentunya sering membaca slogan “orang bijak taat pajak”. Slogan singkat mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya, salah satunya adalah membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, bela negara dan sebagainya. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian dan sebagainya.

Pada kenyataannya, saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara.

Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat, diantaranya adalah:

- a. Membuang sampah sembarangan.
- b. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan sebagainya.
- c. Merusak fasilitas negara, misalnya mencorat-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telpon, dan sebagainya.
- d. Tidak membayar pajak kepada negara, seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir dan sebagainya.
- e. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya

mangkir dari kegiatan siskamling.

Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara.

Tugas Kelompok 6.2

Bacalah kasus di bawah ini bersama teman sebangkumu.

Kesadaran Bayar Pajak Warga Masih Rendah

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan bahwa kesadaran warga Indonesia untuk membayar pajak hingga saat ini masih rendah. Hal itu terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan, yang membayar pajak. “Seharusnya ada enam juta perusahaan yang bayar pajak. Sekarang baru 520 ribu yang bayar. Sementara wajib pajak pribadi baru 30 persen yang bayar pajak,” kata Fuad saat membuka acara seminar yang diadakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 23 September 2013.

Padahal, menurut Fuad, pajak merupakan instrumen yang penting dalam kehidupan bernegara. Seluruh kebutuhan pembangunan negara, baik pembangunan infrastruktur, belanja subsidi, dan kebutuhan belanja pegawai, dibayar dengan uang pajak. “Tapi sebagian besar masyarakat masih belum paham mengenai keberadaan pajak,” katanya.

Fuad berharap seluruh elemen masyarakat mau berpartisipasi secara aktif untuk membangun negara dengan membayar pajak. “Bangsa yang besar dan maju itu sukses dalam perpajakan. Mereka (warganya) mau urunan,” kata Fuad.

Jika kesadaran warga dalam membayar pajak sudah terbangun, Fuad optimistis *tax ratio* akan terus tumbuh dan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan maksimal. “Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa maju dengan pesat. *Tax ratio* Cina mencapai 17,5 persen. Sedangkan Indonesia baru 12 persen. Kalau semua bayar pajak, *tax ratio* Indonesia bisa mencapai 18 persen,” katanya.

Sumber: <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/23/092515799>

Setelah membaca kasus di atas diskusikanlah dengan teman sebangkumu pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

- Apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak?
- Jelaskan akibat yang akan diterima negara ketika pendapatan dari pajak terus mengalami penurunan.
- Apa saja solusi yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak? Bagaimana tingkat keberhasilan dari solusi tersebut?
- Kemukakan solusi yang kalian tawarkan untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak dan kesadaran melaksanakan kewajiban lainnya sebagai warga negara.
- Kemukakan kasus lain yang berkaitan dengan pengingkaran kewajiban warga negara yang pernah terjadi di daerahmu. Serta bagaimana proses penyelesaiannya?

Refleksi

Setelah kalian menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, tentunya kalian semakin yakin bahwa hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya harus seimbang. Nah coba sekarang renungkanlah hal-hal berikut serta cobalah berikan jawabannya. Setelah mampu kalian jawab, kemudian amalkanlah dalam kehidupanmu sehari-hari.

- Bila kalian berbuat sewenang-wenang, siapakah yang dirugikan? Jika demikian, bagaimana keharusannya?
- Pelanggaran hak cipta dalam bentuk penjualan VCD/DVD bajakan sangat merugikan pemegang hak ciptanya. Atas kejadian tersebut, bagaimana sikap kalian ketika menemukan barang-barang bajakan diperjualbelikan?
- Coba kemukakan hak dan kewajiban yang ada di pundakmu sehubungan dengan kedudukanmu sebagai seorang anak, pelajar, kakak atau adik, warga kota atau desa di mana kalian bertempat tinggal?
- Apa yang akan kalian lakukan apabila melanggar hak orang lain dan mengabaikan kewajiban?

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **hak, kewajiban, hak asasi, kewajiban asasi, hak konstitusional dan kewajiban konstitusional.**

2. Intisari Materi

- a. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Dalam diri setiap melekat hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi bersifat universal tanpa melihat status kewarganegaraan, sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Dengan demikian ada jenis hak asasi yang hanya dimiliki oleh warga negara saja, yang bukan warga negara tidak memiliki hak tersebut untuk diwilayah yang bukan negaranya.
- b. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana di atur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya, dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya.
- d. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri.
- e. Pengingkaran kewajiban warga negara biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara.

Penilaian Diri

Hak dan kewajiban erat kaitannya dengan tanggung jawab yang dipikul oleh setiap orang. Nah berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini terdapat dua buah cerita yang berkaitan dengan tanggung jawab. Coba kalian telaah dua cerita tersebut kemudian jawablah pertanyaannya.

1. Pak Joko adalah seorang yang sudah berusia lanjut, sehingga ia tidak dapat lagi membersihkan rumahnya sendiri. Seminggu sekali, Pak Joko menyuruh Andi dan Susi untuk membersihkan lantai, membuang sampah, dan pergi ke pasar. Andi dan Susi selalu mengerjakan tugas yang diberikan Pak Joko dengan baik

dan penuh kesungguhan, sehingga rumah pak Joko selalu kelihatan bersih. Setelah Andi dan Susi selesai mengerjakan tugasnya, Pak Joko selalu memberikannya upah atas pekerjaan yang dilakukannya.

2. Santi, Budi dan Laros sedang berjalan pulang dari sekolah menuju rumah. Mereka melihat orang yang sudah tua renta berada di pinggir jalan untuk menyebrang. Di jalan sangat ramai dengan kendaraan. Walaupun di sana sudah ada jembatan penyebrangan dan lampu lintas, namun orang tua tersebut nampak kebingungan dan ketakutan untuk menyebrangi jalan melalui jembatan penyebrangan. Santi, Budi dan Laros kemudian membantu orang tua tadi menyebrangi jalan tanpa harus melewati jembatan penyebrangan, mengingat kondisi orang tua tersebut yang sudah kelelahan. Mereka menyebrangkan orang tersebut, ketika semua kendaraan berhenti sebagai akibat dari menyalanya lampu lalu lintas yang berwarna merah.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan dua cerita di atas.

1. Siapa yang meliki tanggung jawab pada situasi yang terjadi dalam dua cerita di atas?
2. Apa tanggung jawab itu?
3. Apa sumber dari setiap tanggung jawab?
4. Mengapa melaksanakan setiap tanggung jawab itu penting?
5. Apa saja akibat dari pelalaian sebuah tanggung jawab?
6. Pernahkah kalian melalaikan tanggung jawab? Jika pernah, mengapa kalian melalaikan tanggung jawab? Apa saja dampak atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut?

Praktik Belajar Kewarganegaraan

Mari Meneliti

1. Kelas dibagi kedalam 4 (empat) kelompok besar .
2. Siswa mencari informasi yang dibutuhkan secara bekerjasama dalam kelompoknya masing-masing.
3. Setiap kelompok memilih literatur (buku, jurnal, majalah, koran, buletin dan internet) yang memuat topik:
 - a. Permasalahan peredaran barang-barang bajakan yang melanggar hak cipta.
 - b. Angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia.
 - c. Rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak.
 - d. Hukuman yang masih rendah bagi para koruptor.
4. Setiap kelompok mengkaji dan mencatat informasi yang didapat melalui berbagai literatur (buku, jurnal, majalah,

koran, buletin dan internet) yang dipilih yang berkaitan dengan materi yang dibelajarkan.

5. Setiap kelompok harus membuat laporan hasil inkuiri keputustaannya.
6. Setiap kelompok mempresentasikan laporan hasil inkuiri keputakaan secara panel dalam diskusi kelas.
7. Setiap kelompok menanggapi setiap pemaparan laporan yang dilontarkan oleh kelompok lain.
8. Setiap kelompok menyimpulkan laporan hasil inkuiri keputustaannya setelah mendapatkan masukan dari kelompok lain.

Uji Kompetensi Bab 6

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara jelas dan akurat.

1. Jelaskan perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara.
2. Jelaskan perbedaan antara kewajiban asasi dengan kewajiban warga negara?
3. Kemukakan hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Mengapa terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?
5. Bagimanakah cara kalian untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dan pengingkaran terhadap kewajiban?
6. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam memecahkan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.

Menatap Tantangan Integrasi Nasional

Aku cinta Indonesia! Kalimat itulah yang harus selalu kita gaungkan sebagai Warga Negara Indonesia. Kalimat tersebut bukan hanya untuk digaungkan, tetapi harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak perlu mencari-cari alasan mengapa kita harus mencintai dan menjunjung tinggi Indonesia, karena mencintai dan menjunjung tinggi negara itu merupakan sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa apabila dalam diri kita, kecintaan kepada negara semakin hari semakin besar, karena itu semua merupakan anugerah Tuhan yang amat besar.

Nah, untuk semakin meyakinkan kecintaan kita kepada Indonesia, coba kalian nyanyikan bersama-sama lagu “Dari Sabang Sampai Merauke” ciptaan R. Suharjo. Nyanyikanlah dengan penuh semangat.

Dari Sabang Sampai Merauke

Dari Sabang sampai Merauke
Berjajar pulau-pulau
Sambung menyambung menjadi satu
Itulah Indonesia
Indonesia tanah airku
Aku berjanji padamu
Menjunjung tanah airku
Tanah airku Indonesia

Apa makna yang terkandung dalam lagu tersebut? Tentu saja kalian akan menyimpulkan bahwa dalam lagu tersebut ditegaskan begitu luasnya wilayah negara kita. Selain itu, negara Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hal itu memberikan konsekuensi bahwa keanekaragaman atau kebhinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebhinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan sebagainya.

Kebhinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi, karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebhinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman, karena dengan adanya kebhinekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut.

Pada bab ini kalian akan diajak untuk mendalami strategi dalam membangun integrasi nasional, sehingga pada akhirnya nanti kalian diharapkan dapat mengenali berbagai macam jenis ancaman bagi integrasi Bangsa Indonesia dan menganalisis strategi yang diterapkan bangsa Indonesia untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut.

A. Mewaspadai Ancaman terhadap Integrasi Nasional



Kalian tentunya pernah melihat peta dunia. Dalam peta tersebut, kalian dapat menunjukkan posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada diantara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sangat sangat strategis.

Perlu kalian ketahui, bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain:

1. Penduduk Indonesia berada diantara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan.
2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan.
3. Demokrasi Pancasila berada diantara demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan.
4. Ekonomi Indonesia berada diantara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan.
5. Masyarakat Indonesia berada diantara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan.
6. Kebudayaan Indonesia dinataranya kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan.

7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada diantara sistem pertahanan continental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan dan timur.

Posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa.

Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, berikut ini diuraikan secara singkat ancaman yang dihadapi Bangsa Indonesia baik yang berupa ancaman militer maupun non-militer.

1. Ancaman Militer

Ancaman militer berkaitan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi/invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara.

Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah.

Info Kewarganegaraan

Dalam membangun integrasi nasional, Bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG, yaitu:

1. Ancaman, merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik.
2. Tantangan, merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan
3. Hambatan, merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.
4. Gangguan, merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak dua kali, yaitu 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948.



Sumber: Dokumen kemdikbud

Gambar 7.1 Salah satu pesawat tempur yang digunakan Belanda ketika melakukan Agresi Militer kepada Indonesia.

Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah (wilayah laut, ruang udara dan daratan) Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah.

Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Pemberontakan tersebut pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri, tetapi pemberontakan bersenjata tidak jarang disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup.

Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal, seperti DI/TII, PRRI, Permesta, Pemberontakan PKI Madiun, serta G-30-S/PKI. Beberapa sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintahan yang sah, tetapi juga mengancam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 7.2 Para Pahlawan Revolusi yang menjadi korban akibat Pemberontakan PKI.

Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase, sehingga harus dilindungi. Fungsi pertahanan negara ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital nasional dan instalasi strategis dari setiap kemungkinan aksi sabotase dengan mempertinggi kewaspadaan yang didukung oleh teknologi yang mampu mendeteksi dan mencegah secara dini.

Pada abad modern dewasa ini, kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak mudah dideteksi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan.

Aksi teror bersenjata merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa siapa saja, sehingga sulit diprediksi dan ditangani dengan cara-cara biasa. Perkembangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris pada dekade terakhir meningkat cukup pesat dengan mengikuti perkembangan politik, lingkungan strategis, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Kondisi geografi

Indonesia dengan wilayah perairan serta wilayah udara Indonesia yang terbentang pada pelintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara, berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara.

Bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara yang mendapat prioritas perhatian dalam penyelenggaraan pertahanan negara meliputi pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, penangkapan ikan secara ilegal, atau pencurian kekayaan di laut, termasuk pencemaran lingkungan.

Tugas Mandiri 7.1

Nah, setelah membaca uraian materi di atas, coba kamu prediksikan apa yang akan terjadi apabila ancaman-ancaman militer tidak dapat ditanggulangi oleh negara kita. Tuliskan prediksimu pada bagian di bawah ini.

Prediksi saya apabila negara kita tidak dapat menanggulangi ancaman militer adalah

.....

.....

.....

.....

2. Ancaman Non-Militer

Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.

a. Ancaman di Bidang Ideologi

Secara umum Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia, walaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya. Akan tetapi, meskipun demikian bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme.

Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Akan tetapi, pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya perilaku seks bebas dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

b. Ancaman di Bidang Politik

Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia, yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya.



Sumber: www.zonadamai.com

Gambar 7.3 Tindakan anarkis menjadi ancaman bagi Bangsa Indonesia dalam bidang politik.

Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa.

c. Ancaman di Bidang Ekonomi

Pada saat ini ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan, saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya.

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara.

Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi diantaranya:

Info Kewarganegaraan

Ekonomi kerakyatan sangat menghindari:

- Sistem *free fight liberalism* yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi kerakyatan.
- Sistem etatisme, dalam arti negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

- 1) Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batasan-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri.
- 2) Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor.
- 3) Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Pihak yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas.
- 4) Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan.
- 5) Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhannya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Masyarakat paripurna, adil dan makmur, merata secara material dan spiritual hanya akan tercapai apabila pembangunan nasional berjalan lancar. Kelancaran proses pembangunan nasional didorong oleh keadaan negara yang aman dan damai serta terbebas dari segala hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut tercipta karena setiap warga negara Indonesia selalu waspada dan siap siaga mengamankan keutuhan dan integrasi nasional.

d. Ancaman di Bidang Sosial Budaya

Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam, dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme.

Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, diantaranya adalah:

- 1) Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri.
- 2) Munculnya sifat *hedonisme*, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya dan sebagainya.
- 3) Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen dan sebagainya.
- 4) Munculnya gejala *westernisasi*, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakain yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting dan sebagainya.
- 5) Semakin mudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial.
- 6) Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tugas Mandiri 7.2

Nah, setelah membaca uraian materi di atas, coba kamu prediksi juga apa yang akan terjadi apabila ancaman-ancaman non-militer tidak dapat ditanggulangi oleh negara kita. Tuliskan prediksimu pada bagian di bawah ini.

Prediksi saya apabila negara kita tidak dapat menanggulangi ancaman non-militer adalah

.....
.....
.....
.....
.....
.....

B. Strategi dalam Mengatasi Berbagai Ancaman Dalam Membangun Integrasi Nasional



1. Strategi dalam Mengatasi Ancaman Militer

Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1) *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*
- (2) *Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.*
- (3) *Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.*
- (4) *Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.*
- (5) *Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.*

Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggungjawab seluruh Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI dan POLRI manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta

keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Info Kewarganegaraan

Komponen Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta terdiri atas:

1. TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan.
2. POLRI sebagai kekuatan utama sistem keamanan.
3. Rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan:

- a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
- b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
- c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.



Sumber: bpmkotabandaaceh.wordpress.com

Gambar 7.4 Perwujudan kemanunggalan TNI/Polri dan rakyat.

Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan didasarkan pada doktrin dan strategi Sishankamrata yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia. Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya, maupun antara kekuatan militer dengan kekuatan nir militer. Keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan tiga kekuatan militer Republik Indonesia, yaitu keterpaduan antar kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara. Sedangkan keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan non-militer diwujudkan dalam keterpaduan antar komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Keterpaduan tersebut diperlukan dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan, baik dalam rangka menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional.

Berdasarkan analisa lingkungan strategik, maka ancaman militer dari negara lain (ancaman tradisional) yang berupa invasi, adalah kecil kemungkinannya. Namun demikian, kemungkinan ancaman tersebut tidak dapat diabaikan dan harus tetap dipertimbangkan. Ancaman tradisional yang lebih mungkin adalah konflik terbatas yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah dan atau menyangkut masalah perbatasan. Komponen Utama disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP). Penggunaan komponen cadangan dilaksanakan sebagai pengganda kekuatan komponen utama bila diperlukan, melalui proses mobilisasi/demobilisasi. Kendatipun kekuatan pertahanan siap dikerahkan untuk melaksanakan OMP, namun setiap bentuk perselisihan dengan negara lain selalu diupayakan penyelesaiannya melalui jalan damai. Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya dilaksanakan sebagai jalan terakhir apabila cara-cara damai tidak berhasil.

Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Termasuk didalam ancaman ini adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Oleh karenanya kekuatan pertahanan, terutama TNI, juga disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna menghadapi ancaman non-tradisional. Pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan berdasarkan keputusan politik pemerintah.

2. Strategi dalam Mengatasi Ancaman Non-Militer

Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa globalisasi telah berpengaruh kepada semua bidang kehidupan, diantaranya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Hal tersebut membawa dampak bahwa ancaman yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi ancaman non-militer pun tidak kalah bahanya. Oleh karena itu diperlukan strategi pertahanan non-militer

yang tidak kalah hebat dengan strategi untuk mengatasi ancaman militer. Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum. Dengan kata lain sebagai subsistem pertahanan negara, pertahanan nonmiliter memiliki kepentingan pertahanan, yakni kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Sekaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Hal itu penting dilakukan untuk menjalankan strategi pertahanan non-militer dalam menghadapi berbagai macam ancaman yang bersifat non-militer. Berikut ini dipaparkan strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman non-militer.

a. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ideologi dan Politik

Ada empat hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu *demokratisasi, kebebasan, keterbukaan* dan *hak asasi manusia*. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya (Amerika Serikat dan sekutunya) dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Tidak jarang jika suatu negara tidak mengedepankan empat hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama, bahkan lebih menyedihkan lagi dianggap sebagai teroris dunia serta akan diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik dan sebagainya. Sebagai contoh Indonesia pernah diembargo dalam bidang ekonomi oleh Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya, karena pada waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat, sementara sekutunya tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Misalnya Israel yang banyak membunuh rakyat Palestina dan menyerang Libanon tetap direstui tindakannya tersebut oleh Amerika Serikat.

Di sisi lain, isu demokratisasi pada saat ini benar-benar mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi demokratisasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya adalah selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antar negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang

kuat, mandiri dan tahan uji serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik, dengan tetap mempertahankan wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika.

Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan demokrasi politik.
- 2) Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik.
- 3) Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar.
- 4) Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- 5) Menegakkan supremasi hukum.
- 6) Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.

Tugas Kelompok 7.1

Lakukan analisis terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada saat ini. Tulis hasil analisis kalian di buku tugas masing-masing.

b. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Ekonomi

Sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, globalisasi lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekita abad ke-15 telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad 20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi semakin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara mulai negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia.

Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF (*International Monetary Fund*), Bank Dunia (*World Bank*) dan WTO (*World Trade Organization*) belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat bahkan menderita karena kebijakan yang salah dan aturannya yang tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini

selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju, sehingga semua kebijakannya selalu memihak kepentingan-kepentingan negara maju.

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini:

- 1) Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat.
- 2) Pertanian dijadikan prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai

petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Globalisasi tidak bisa kita hindari. Supaya globalisasi dapat mendatangkan manfaat bagi kemajuan bangsa, kita bersikap selektif terhadap semua pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita tolak seperti pergaulan bebas, kebiasaan minum minuman keras, berpakaian seronok dan sebagainya. Sebaliknya, pengaruh globalisasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita terima, seperti bekerja keras, hemat, disiplin, bertanggung jawab, inovatif, kreatif dan sebagainya.



Sumber: www.deptan.go.id

Gambar 7.5 Pertanian merupakan potensi besar bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman globalisasi ekonomi.

- 3) Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak, haruslah bersifat murah dan terjangkau.
- 4) Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia dan WTO.
- 5) Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju.

c. Strategi Mengatasi Ancaman di Bidang Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang, perlu diperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, diantaranya yang memegang peranan penting, ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun dari luar. Biasanya, yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan. Agar dapat memahami perubahan sosial yang terjadi, perlu dipelajari bagaimana proses perubahan itu terjadi, dan bagaimana perubahan itu diterima masyarakat.

Pengaruh dari luar perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang berbhinneka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu.

Tugas Kelompok 7.2

Nah setelah kalian membaca uraian diatas, coba kalian bersama teman sebangku melakukan penilaian atas strategi yang diterapkan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman terhadap integrasi nasional! Informasikan hasil penilaian kelompok kalian kepada kelompok lainnya!

Jenis Ancaman	Bentuk Strategi	Indikator Keberhasilan
Ancaman Militer	Menerapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata)	Keamanan di wilayah Indonesia relatif terkendali, dikarenakan adanya kerjasama yang erat antara TNI/Polri dengan rakyat.

Ancaman bermuatan ideologi		
Ancaman bermuatan politik		
Ancaman bermuatan ekonomi		
Ancaman bermuatan sosial budaya		

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi strategi dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional, tentunya kalian semakin paham bahwa upaya untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang coba kalian lakukan identifikasi perilaku masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian dalam mendukung upaya untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional!

No	Sikap dan Perilaku
1	Menjalankan ronda malam secara rutin
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **integrasi nasional, strategi nasional, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.**

2. Intisari Materi

- a. Posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial.
- b. Posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai Negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa
- c. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer.
- d. Strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).
- e. Ancaman yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi ancaman non-militer pun tidak kalah bahanya. Oleh karena itu diperlukan strategi pertahanan non-militer yang tidak kalah hebat dengan strategi untuk mengatasi ancaman militer. Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum.

Penilaian Diri

Coba kalian analisis peristiwa di bawah ini!

Mengenang Gempa Bumi dan Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam

Peristiwa yang tidak terlupakan bagi rakyat di Nanggroe Aceh Darussalam adalah gempa bumi dahsyat dengan kekuatan 9,5 SR yang disusul dengan gelombang pasang tsunami terbesar sepanjang sejarah Aceh, yang menewaskan ratusan ribu warga masyarakat sekitar Samudera Hindia dan jumlah terbesar terdapat di Aceh. Peristiwa pilu tersebut terjadi pada hari Minggu pagi 26 Desember 2004 pukul 07.58:53 WIB. Gempa bumi yang berpusat dilepas pantai "Serambi Mekkah" telah menggerakkan gelombang laut yang sangat dahsyat meluluhlantakkan berbagai kota di daerah paling ujung utara pulau Sumatera tersebut.

Data jumlah korban tewas di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara menurut Departemen Sosial RI adalah 105.262 orang. Sedangkan menurut kantor berita Reuters, jumlah korban Tsunami diperkirakan sebanyak 168.183 jiwa dengan korban paling banyak diderita Indonesia, yaitu 115.229 orang. Sedangkan total luka-luka sebanyak 124.057 orang, diperkirakan 100.000 orang.

Bantuan terhadap Aceh dan Sumatera Utara datang dari berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri. Bantuan pertama datang dari Kapal Induk AS, George Washington yang berada di perairan pulau Weh, Sabang. Kapal Induk AS George Washington yang memang sering melintasi kawasan Selat Malaka -Teluk Parsia sangat efektif dalam memberi bantuan kemanusiaannya, karena mereka memiliki banyak helikopter yang bisa segera dioperasikan. Kemudian AS juga mengerahkan rumah sakit apungnya, untuk mengobati warga yang mengalami luka-luka tersebut.

Berbagai negara mengirimkan bantuannya ke Aceh, apalagi setelah Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengumumkan gempa dan tsunami Aceh itu sebagai "Darurat nasional". Tidak ketinggalan rakyat Indonesia di daerah lainnya berbondong-bondong memberikan bantuan. Mereka ada yang menjadi

relawan menolong korban di lokasi kejadian, ada juga yang berinisiatif mengumpulkan uang, selimut, pakaian layak pakai dan sebagainya untuk didonasikan kepada korban bencana tersebut. Dengan kata lain semua masyarakat bahu membahu bersatu untuk membantu para korban gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara.

Sumber: <http://sejarah.kompasiana.com/2012/12/24>

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Apa yang kalian rasakan ketika membaca kembali peristiwa gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara?
2. Setujukah kalian apabila Kapal Induk AS, George Washington memasuki perairan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Indonesia? Berikan Alasanmu!
3. Sejauh yang kalian ketahui, bagaimana kontribusi rakyat Indonesia dalam membantu korban gempa bumi dan tsunami tersebut?
4. Identifikasi nilai-nilai apa saja yang dapat kalian teladani dalam wacana di atas? Nilai-nilai apa saja yang sudah dan belum kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari?

Praktik Belajar Kewarganegaraan

Mari Membuat Proyek Kewarganegaraan

1. Pilihlah oleh kelasmu salah satu masalah-masalah di bawah ini :
 - a. Rendahnya rasa nasionalisme dikalangan remaja
 - b. Rendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan budaya nasional
 - c. Semakin meningkatnya angka kemiskinan
 - d. Banyaknya remaja yang lebih senang terhadap budaya barat dibandingkan budaya nasional.
2. Bentuklah kelasmu dalam 4 kelompok untuk membahas satu masalah yang dianggap paling penting oleh kelasmu
3. Masing-masing kelompok mengkaji permasalahan tersebut dan membuat laporan (portofolio) dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Kelompok I :** Menjelaskan masalah secara tertulis dilengkapi gambar, foto, karikatur, judul surat kabar dan ilustrasi lain disertai sumber-sumber informasinya tentang:
- 1) Bagaimana jalannya masalah?
 - 2) Seberapa luas masalah tersebar pada bangsa dan negara?
 - 3) Mengapa masalah harus ditangani pemerintah dan haruskah seseorang bertanggung jawab memecahkan masalah?
 - 4) Adakah kebijakan tentang masalah tersebut?
 - 5) Adakah perbedaan pendapat, siapa organisasi yang berpihak pada masalah ini?
 - 6) Pada tingkat atau lembaga pemerintah apa yang bertanggung jawab tentang masalah ini?
- b. Kelompok II :** Merumuskan kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah. Menjelaskan secara tertulis dilengkapi gambar, foto, karikatur dan ilustrasi lain disertai sumber-sumber informasinya tentang :
- 1) Kebijakan alternatif yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber informasi yang dikumpulkan
 - 2) Kajian terhadap setiap kebijakan alternatif tersebut dengan menjawab pertanyaan kebijakan apakah yang diusulkan dan apakah keuntungan dan kerugian kebijakan tersebut.
- c. Kelompok III :** Mengusulkan kebijakan publik untuk mengatasi masalah dilengkapi gambar, foto, karikatur, judul surat kabar, dan ilustrasi lain disertai sumber-sumber informasinya tentang :
- 1) Kebijakan yang diyakini akan dapat mengatasi masalah.
 - 2) Keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut.
 - 3) Kebijakan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
 - 4) Tingkat atau lembaga pemerintah mana yang harus bertanggung jawab menjalankan kebijakan yang diusulkan.
- d. Kelompok IV :** Membuat rencana tindakan yang mencakup langkah-langkah yang dapat diambil agar kebijakan yang diusulkan diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini berupa penjelasan tentang:
- 1) Bagaimana dapat menumbuhkan dukungan pada individu dan kelompok dalam masyarakat terhadap rancangan tindakan yang diusulkan.

- 2) Mendeskripsikan individu atau kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat yang mungkin hendak mendukung rancangan tindakan kelas dan bagaimana kalau dapat memperoleh dukungan tersebut.
- 3) Menggambarkan pula kelompok di masyarakat yang mungkin menentang rancangan tindakan dan bagaimana kalian dapat meyakinkan mereka untuk mendukung rencana tindakan.
4. Masing-masing kelompok menyajikan/ mempersatukan hasilnya di hadapan dewan juri atau guru yang mewakili sekolah.

Uji Kompetensi Bab 7

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat!

1. Jelaskan posisi silang negara Indonesia baik dari aspek kewilayahan maupun aspek kehidupan sosial!
2. Mengapa posisi silang negara Indonesia bukan hanya merupakan potensi yang harus disyukuri, tetapi juga merupakan tantangan sekaligus ancaman bagi integrasi nasional?
3. Jelaskan ancaman militer yang paling mengancam integrasi nasional bangsa Indonesia pada saat ini?
4. Mengapa ideologi Pancasila tidak bisa dikatakan aman dari berbagai macam ancaman dalam pengimplementasian nilai-nilainya di masyarakat!
5. Jelaskan strategi bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman-ancaman yang bersifat non-militer?
6. Dalam hidupmu selama ini tentu telah menghadapi persoalan yang memerlukan kewaspadaan agar dirimu dan orang lain selaras. Cobalah perhatikan situasi yang berkaitan dengan kewaspadaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Apa yang akan kamu lakukan apabila terjadi tawuran? Kemukakan pula perasaanmu sebagai seorang warga negara ketika menghadapi tawuran yang terjadi di sekolah atau kampungmu?

Menelusuri Dinamika Kehidupan Bernegara dalam Konteks Geopolitik Indonesia

Kita mesti bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menakdirkan kita sebagai Warga Negara Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa dan negara besar yang harus kita banggakan. Indonesia mempunyai wilayah yang luas, kekayaan alam yang melimpah, suku bangsa dan bahasa yang beraneka ragam, tetapi semua itu dapat dipersatukan dalam sebuah ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia juga mempunyai sejarah yang membanggakan, kemerdekaan yang kita raih bukanlah hadiah dari penjajah, tetapi kita menjadi bangsa yang memerdekakan dirinya sendiri. Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai sebuah negara merdeka. Itu semua menjadi keunggulan bangsa Indonesia.

Coba kalian amati gambar 8.1 di bawah ini.



Sumber: 30 tahun Indonesia merdeka

Gambar 8.1 Pembacaan Teks Proklamasi Oleh Ir. Soekarno.

Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Tentunya kalian sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengakhiri rentetan penderitaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah.

Proklamasi telah melahirkan Indonesia sebagai negara baru yang mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lainnya yang telah merdeka terlebih dahulu. Kehidupan bangsa Indonesia setelah merdeka begitu dinamis. Berbagai macam perubahan dalam berbagai bidang seolah-olah menjadi bumbu penyedap kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sejarah mencatat semenjak proklamasi sampai sekarang bangsa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan yang dianggap radikal seperti perubahan sistem pemerintahan, bentuk negara, konstitusi dan sebagainya. Itu semua dinamika kehidupan bangsa Indonesia yang patut dijadikan pelajaran oleh kita.

Nah, pada bab ini kalian akan dihantarkan untuk mendalami dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik Indonesia. Setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan dalam diri kalian muncul kebanggaan sebagai warga negara Indonesia, serta kalian mampu mengalisis keunggulan bangsa Indonesia dibandingkan bangsa lainnya.

A. Hakikat Konsep Geopolitik



1. Pengertian Geopolitik

Diantara kalian adakah yang sudah mengetahui konsep geopolitik? Apabila belum ada baiknya kalian mencermati uraian materi berikut ini. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata *geo* (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata *polis* yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara; dan *teia* yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Frederich Ratzel sebagaimana dikutip oleh Noor MS Bakry mengenalkan istilah ilmu bumi politik (*political geography*), selain itu Rudolf Kjellen menyebut *geographical politic* dan disingkat *geopolitik*.

Untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, berikut ini adalah teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia sebagaimana dikutip oleh Noor Ms Bakry dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Kewarganegaraan* (2009:275 - 277)

a. Teori Geopolitik Frederich Ratzel

Frederich Ratzel (1844–1904) berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat (bangsa). Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan



Sumber: www.wikipedia.org
Gambar 8.2 Frederich Ratzel

maju. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap hidup dan berkembang butuh ekspansi (perluasan wilayah sebagai ruang hidup). Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis.

b. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen

Rudolf Kjellen (1864–1922) melanjutkan ajaran Ratzel, tentang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan krato politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Paham ekspansionisme dikembangkan. Batas negara bersifat sementara karena bisa diperluas. Strategi yang dilakukan adalah membangun kekuatan darat yang dilanjutkan kekuatan laut.

c. Teori Geopolitik Karl Haushofer

Karl Haushofer (1869–1946) melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellen terutama pandangan tentang *lebensraum* (hak suatu bangsa atas ruang hidup untuk dapat menjamin kesejahteraan dan keamanannya) dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup (*lebensraum*) bagi warga negara.

d. Teori Geopolitik Halford Mackinder

Halford Mackinder (1861–1947) mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah ‘jantung’ dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori Daerah Jantung. Barang siapa menguasai ‘daerah jantung’ (Eropa Timur dan Rusia) maka ia akan menguasai pulau dunia (Eropa, Asia, dan Afrika) yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Untuk menguasai dunia dengan menguasai daerah jantung dibutuhkan kekuatan darat yang besar sebagai prasyaratnya. Berdasarkan hal ini muncullah konsep Wawasan Benua atau konsep kekuatan di darat.

e. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan

Alfred Thayer Mahan (1840–1914) mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut. Sehingga tidak hanya pembangunan armada laut saja yang diperlukan, namun lebih luas juga membangun kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut, muncul konsep Wawasan Bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia.

f. Teori Geopolitik Giulio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller

Giulio Douhet (1869–1930) dan William Mitchel (1878–1939) mempunyai pendapat lain dibandingkan dengan para pendahulunya. Keduanya melihat kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa membangun armada atau angkatan udara lebih menguntungkan sebab angkatan udara memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya. Di samping itu, angkatan udara dapat menghancurkan musuh di kandangnya musuh itu sendiri atau di garis belakang medan peperangan. Berdasarkan hal ini maka muncullah konsepsi Wawasan Dirgantara atau konsep kekuatan di udara.

Tugas Mandiri 8.1

Nah, setelah mencermati uraian di atas, analisislah setiap teori geopolitik di atas, kemudian tentukan teori siapa yang masih relevan sampai dengan saat ini, terutama dengan kondisi negara Indonesia. Tulislah hasil analisismu dalam buku tugas masing-masing.

2. Konsep Geopolitik Indonesia

Setelah mengenal konsep geopolitik yang pernah dipakai oleh negara-negara di dunia, penting bagi kalian untuk mengetahui dan memahami sejarah dan konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia.

Teori geopolitik yang diutarakan oleh para ahli di atas tidak dapat sepenuhnya diterima dan diterapkan dalam ideologi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran atau teori tentang adu kekuatan dan adu kekuasaan. Teori ini tentu saja mengandung benih-benih persengketaan dan perpecahan. Teori geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. Dengan kata lain, bangsa Indonesia ingin dapat menjamin kepentingan bangsa dan negara di tengah-tengah dinamika pergaulan internasional. Bagi bangsa Indonesia kepentingan nasional yang paling dasar adalah persatuan dan kesatuan nasional, identitas (jati diri) bangsa, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Kemudian siapa yang pertama kali memperkenalkan teori geopolitik Indonesia? Istilah geopolitik untuk bangsa Indonesia dipopulerkan pertama kali oleh Ir. Soekarno. Pada pidatonya di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyatakan sebagai berikut :

Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempo sedikit: Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa?

Menurut Renan, syarat bangsa adalah kehendak akan bersatu. Perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa: *le desir d'être ensemble*, yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, yang menjadi bangsa yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.

Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer, di dalam bukunya *Die Nationalitätenfrage*, di situ ditanyakan: *Was ist eine Nation?* dan jawabannya ialah *eine Nation ist ein aus Schicksalsgenmeinschaft erwachsene Character-gemeinschaft*. Inilah menurut Otto Bauer satu *natie*. (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib). Tetapi kemarin pun, tatkala, kalau tidak salah, Prof. Supomo menisitir Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Moh. Yamin berkata: *verouderd*: tua. Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah *verouderd*; sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu *wetenschap* baru, satu ilmu baru, yang dinamakan Geopolitik.

Kemarin kalau tidak salah, saudara Ki Bagus Hadikusumo, atau tuan Munandar, mengatakan tentang persatuan antara orang dan tempat. Persatuan antarorang dan tempat, tuan-tuan sekalian.

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan *Gemeinschaft*-nya dan perasaan orangnya. *J'aime et le desir*. Mereka bumi yang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah swt membuat peta dunia, menunjukkan di mana kesatuan-kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau di antara dua lautan yang besar, lautan Pasifik dan lautan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan lain-lain pulau kecil di antaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir Timur benua Asia sebagai golfbreker atau penghadang gelombang lautan Pasifik adalah satu kesatuan. Anak kecil pun dapat melihat bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas

dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan.

Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah swt demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athena plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani, adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera aja, atau Borneo aja atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah swt menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua Samudera, itulah Tanah Air kita. (*Risalah sidang BPUPKI dan PPKI*).

Berdasarkan pidato tersebut, wilayah Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang terletak antara dua samudera dan dua benua. Kesatuan antara bangsa Indonesia dengan wilayah tanah air itulah yang membentuk semangat dan wawasan kebangsaan, yaitu sebagai bangsa yang bersatu. Rasa kebangsaan Indonesia dibentuk oleh adanya kesatuan nasib, jiwa untuk bersatu dan kehendak untuk bersatu serta adanya kesatuan wilayah yang sebelumnya, bernama Nusantara.



Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 8.3 Bangsa Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah dan suku bangsa.

Prinsip geopolitik Indonesia sebagaimana tersebut di atas menandakan bahwa dalam hal wilayah, bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memluas wilayah sebagai ruang hidup. Secara historis, kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah bekas jajahan Belanda atau eks Hindia Belanda. Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah dengan konsepsi Wawasan Nusantara.

Berdasarkan uraian di atas, konsepsi Wawasan Nusantara dibangun atas geopolitik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik/kekuasaan. Wawasan Nusantara

sebagai wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia.

3. Konsep Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hakikat dari Wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup:

a. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik

- 1) Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- 2) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk, dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.

Info Kewarganegaraan

Menurut Friederich Hertz dalam bukunya yang berjudul *Nationality in History and Politics*, setiap bangsa mempunyai empat unsur aspirasi sebagai berikut:

1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri dari keastuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi dan solidaritas.
2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya.
3. Keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, atau kekhasan. Misalnya menjunjung tinggi bahasa nasional yang mandiri.
4. Keinginan untuk unggul diantara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh dan prestise.



Sumber: www.sosbud.kompasiana.com

Gambar 8.4 Slogan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

- 3) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
- 4) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
- 5) Kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6) Bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan kesatuan hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Supaya pelaksanaan Wawasan Nusantara bisa berjalan efektif, maka diperlukan kesadaran WNI untuk :

1. Mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warganegara serta hubungan warganegara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia.
2. Mengerti, memahami, menghayati tentang bangsa yang telah menegara, bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang.

- 7) Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan untuk kepentingan nasional.
- b. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi**
- 1) Bahwa kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
 - 2) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya.
 - 3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat.
- c. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya**
- 1) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.



Sumber: jampismansa.blogspot.com

Gambar 8.5 Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

- 2) Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

d. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan

- 1) Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara.
- 2) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara.

Dari uraian di atas semakin jelas tergambar bahwa negara kepulauan Indonesia dipersatukan bukan hanya dari aspek kewilayahannya saja, tetapi meliputi pula aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara bagi Indonesia merupakan suatu politik kewilayahan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai politik kewilayahan, Wawasan Nusantara mempunyai sifat manunggal dan utuh menyeluruh. Wawasan Nusantara bersifat manunggal artinya mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Sedangkan utuh menyeluruh maksudnya menjadikan wilayah nusantara dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat serta tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apa pun sesuai dengan asas satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa persatuan Indonesia.

Nah sebelum kalian melanjutkan membaca materi selanjutnya, supaya semangat kalian tetap terjaga dan bisa lebih rileks, mari kita nyanyikan terlebih dahulu lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang diciptakan oleh L.Manik. Perhatikan liriknya di bawah ini.

Satu Nusa Satu Bangsa

Satu nusa
Satu bangsa
Satu bahasa kita
Tanah air
Pasti jaya
Untuk Selama-lamanya
 Indonesia pusaka
 Indonesia tercinta
 Nusa bangsa
 Dan Bahasa
 Kita bela bersama

Tugas Kelompok 8.1

Bacalah peristiwa di bawah ini.

Potret Perbatasan: Tinggal di Indonesia, Menggantungkan Hidup Dengan Malaysia

REPUBLIKA.CO.ID, NUNUKAN -- Kehidupan masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, sampai saat ini masih sangat tergantung pada negeri tetangga Malaysia.

“Ketergantungan itu antara lain terlihat dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang dikonsumsi setiap harinya, hampir seluruhnya merupakan produk asal Malaysia,” kata Sannari, seorang warga perbatasan di Ajikuning, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Senin.

Menurut Sannari, kondisi itu masih sulit dihindari mengingat masyarakat Pulau Sebatik dan Kabupaten Nunukan secara umum, suplai sembako masih tergantung dari Malaysia, karena sulitnya mendapatkan produk kebutuhan sehari-hari asal Indonesia. Selain mudah mendapatkannya juga harganya lebih murah daripada produk asal Indonesia.



Sumber: www.republika.co.id

Gambar 8.6 Peta perbatasan RI-Malasia di Nunukan

Misalnya, gula pasir yang merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat, harganya di Malaysia hanya RM 2.20 atau Rp6.600 (RM 1 = Rp3.000) per kg.

Sementara harga gula pasir asal Indonesia harganya mencapai Rp11.000 sampai Rp12.000 per kg bahkan lebih dari itu. Selain itu, untuk mendapatkan produk asal Indonesia sangat sulit karena hanya ada di Kota Tarakan.

Bukan hanya sembako yang diperoleh dari Malaysia, Sannari yang mengaku berasal dari Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan itu menambahkan juga bahan bangunan seperti batu gunung, kerikil, semen, dan lain-lainnya semuanya berasal dari Malaysia.

Oleh karena itu, ketergantungan dengan negeri jiran Malaysia sangat sulit dihindari. “Kalau dibilang masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik ini menggantungkan hidupnya di Malaysia memang iya. Kalau tidak begitu mau makan apa kita di sini (Pulau Sebatik),” ujar Sannari.

Dia mengatakan kemudahan mendapatkan sembako atau kebutuhan lainnya di Malaysia, karena masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik hampir setiap harinya menyeberang ke Tawau, Malaysia, untuk berbelanja. “Masyarakat di sini setiap hari ke Tawau, karena jangkauannya dekat hanya 15 menit sudah sampai di sana (Tawau),” katanya.

Sumber: www.republika.co.id

Nah, setelah membaca peristiwa di atas diskusikanlah dengan teman sebangku pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa saja penyebab timbulnya permasalahan di daerah perbatasan?
2. Mengapa pembangunan belum merata sampai ke daerah perbatasan?
3. Apakah permasalahan di daerah perbatasan inidapat menimbulkan persoalan lainnya? Jika ya, apa saja bentuk persoalan yang mungkin terjadi?
4. Uraikan solusi yang kamu tawarkan kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan di daerah perbatasan?

B. Kehidupan Bernegara dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)



1. **Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)**

Sebagai warga negara yang baik, tentunya kalian harus memahami pengertian atau makna negara Indonesia. Makna tersebut penting diketahui untuk semakin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan dibekali pengetahuan mengenai makna konsep NKRI menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal.

Pasal 1 ayat(1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa "*Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.*" Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, satu tanah air yaitu Indonesia.

Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

Info Kewarganegaraan

Pada tahun 1850, George Windsor Earl seorang etnolog Inggris mengusulkan istilah *Indunesians* dan *preperensi Malayunesians* untuk penduduk kepulauan Hindia atau Malayan Archipelago. Kemudian seorang mahasiswa bernama Earl James Richardson Logan menggunakan Indonesia sebagai sinonim untuk Kepulauan Hindia. Namun dikalangan akademik Belanda, di Hindia Timur enggan menggunakan Indonesia sebaliknya mereka menggunakan istilah Melayu Nusantara (*Malaische Archipel*). Sejak tahun 1900 nama Indonesia menjadi lebih umum dikalangan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakan nama Indonesia untuk ekspresi politiknya. Adolf Bastian dari Universitas Berlin memopulerkan nama Indonesia melalui bukunya *Indonesien oder die inseln des malayischen arcipels (1884-1894)*. Kemudian sarjana bahasa Indonesia pertama yang menggunakan nama Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda dengan nama *Indonesisch Pers-Bureau* di tahun 1913.

tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia.

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mawadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran). UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam lima Pasal, yaitu: Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A dan pasal 37 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “... dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Pembentukan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut bisa dicapai hanyalah dengan adanya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga dalam alinea keempat ini secara tegas diproklamkan, disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbentuk dalam satu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila.

Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang*”. Istilah Nusantara dalam ketentuan

Info Kewarganegaraan

Negara Republik Indonesia pernah mengalami pergantian bentuk negara, dari kesatuan menjadi federal/serikat pada masa berlakunya Konstitusi RIS tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Perubahan tersebut sebagai konsekuensi dari kesepakatan yang terjadi dalam Konferensi Meja Bundar. Akan tetapi bentuk negara tersebut tidak bertahan lama. Hal ini menunjukkan bagi bangsa Indonesia, konsep negara federalism/serikat tidak cocok diterapkan di negara kita.

tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial-budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta di antara Benua Asia dan Australia.

Tugas Mandiri 8.2

Nah setelah kalian membaca uraian materi di atas, coba kalian lakukan studi kepustakaan untuk mencari keunggulan bentuk Negara kesatuan dibandingkan dengan bentuk negara lainnya seperti negara serikat. Tusliskan hasil kalian pada tabel di bawah ini.

No	Keunggulan Negara Kesatuan	Kelemahan Negara Serikat
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini bisa dibuktikan dari nama lain atau julukan terhadap Indonesia, yaitu nusantara, yang berarti di antara nusa atau di antara pulau. Jadi, Indonesia terdiri di antara pulau-pulau. Sebagai negara kepulauan karena jumlah pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah Indonesia sangat banyak yaitu mencapai ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut terletak di persimpangan dunia, yaitu di antara dua samudera dan dua benua. Kedua samudera tersebut adalah Samudera Hindia dan Pasifik, serta di antara Benua Asia dan Australia. Begitu indahnya pulau-pulau yang terletak di wilayah Indonesia yang membujur di garis khatulistiwa, sehingga diibaratkan bagaikan “Untaian Ratna Mutu Manikam atau Zamrud Khatulistiwa”.

Sekalipun wilayah Indonesia tersebar di antara pulau-pulau, namun hal

tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai berai, namun justru menjadi perekat untuk semakin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan secara yuridis formal bangsa Indonesia telah mempunyai landasan yang kuat, misalnya dinyatakan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea II. Selain itu juga dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Dengan demikian, sekalipun secara nyata Indonesia terdiri dari berbagai keanekaragaman penduduknya yang tersebar di berbagai pulau besar dan kecil tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai berai. Hal ini sudah barang tentu merupakan poin tersendiri yang menjadikan kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Melihat dan mencermati kondisi dan letak geografis wilayah Indonesia, sudah sewajarnya setiap insan yang merasa dirinya sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai kebanggaan tersendiri. Bangga di sini dalam arti merasa berbesar hati atau merasa gagah karena mempunyai berbagai kelebihan atau keunggulan. Jadi, yang dimaksud bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia adalah merasa besar hati atau merasa berbesar jiwa atau merasa gagah sebagai bangsa Indonesia.

Konsekuensinya, kalau kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara, dimanapun kita berada. Kita juga akan selalu berupaya meningkatkan citra dan nama baik

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

NKRI adalah harga mati. Pernyataan tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Dalam pernyataan tersebut tergambar ketegasan sikap dan cita-cita bahwa negara Indonesia diperjuangkan kemerdekaannya untuk mewujudkan konsep negara kesatuan diimplementasikan di bumi Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut telah banyak pengorbanan yang dilakukan para pahlawan mulai pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta bahkan nyawa. Hal tersebut dilakukan karena mereka mempunyai semangat kebangsaan. Semangat itulah yang harus kita jaga dan selalu mewarnai setiap perilaku kita. Di dalam semangat kebangsaan terkandung nilai-nilai yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu:

1. *Pro patria* dan *primus patrialis* yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air.
2. Jiwa solidaritas dan setia kawan
3. Jiwa toleransi dan tenggang rasa antaragama, antarsuku, antar golongan dan antarbangsa.
4. Jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab.
5. Jiwa kstaria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung unsur dendam.

Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat, seperti tidak merusak hutan-hutan lindung, benda-benda bersejarah apalagi memperjualbelikannya, selalu menggunakan produk dalam negeri, dan sebagainya.

Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan tersebut menurut Dadang Sundawa dalam tulisannya yang berjudul *Kerangka Sosial Budaya Masyarakat Indonesia* (2007:20 - 22) diantaranya adalah:

- a. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya menyejahterakan bangsa.
- b. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan social budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mnembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan sehingga sekalipun terdapat perbedaan, namun bukan perbedaan yang ditonjolkan tetapi justru persamaannya.
- c. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep Wawasan Nusantara sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman namun prinsipnya kita teteap satu pandangan, yaitu yang memandang bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.
- d. Semangat sumpah pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia; sama-sama merasa berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia serta memiliki sejarah yang sama, yaitu sejarah Indonesia. Dalam pergaulan yang ditonjolkan adalah bangsa Indonesianya, bukan dari mana asal daerahnya.
- e. Memiliki tata krama atau keramah tamahan, sejak dahulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanannya sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Namun demikian, akhir-akhir inii ini kesopanan dan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh ulah segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab, terutama yang gemar membuat kerusakan, kerusakan dan perangai-perangai lain yang justru membuat bangsa lain takut datang ke Indonesia.
- f. Letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu diposisi silang dunia sehingga membuat Negara Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain.
- g. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi, seperti pantai-pantai di Bali (Pantai Kuta, Pantai Sanur dan sebagainya), Sumatra (Danau Toba), Jawa Barat (Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Gunung Tangkuban Perahu). Keanekaragamann flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain.



Sumber: www.wisatanews.com

Gambar 8.7 Keindahan alam menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

- h. Salah satu keajaiban didunia juga ada di Indonesia, yaitu berupa Candi Borobudur yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Selain candi Borobudur, Indonesia pun mempunyai keajaiban dunia lainnya yaitu Pulau Komodo.
- i. Wilayahnya sangat luas, yaitu 5.193.250 Km² yang meliputi daratan seluas 2.027.087 Km² dan lautan seluas 3.166.163 Km².
- j. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam.

Selain hal-hal di atas yang merupakan kondisi objektif bangsa Indonesia, maka secara internasional atau mendunia, bangsa Indonesia juga sudah beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional yang juga tidak sedikit melahirkan sejarah bagi bangsa-bangsa lain. Kita masih ingat apa yang terjadi pada tahun 1955, di mana bangsa Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang dampaknya sangat luas bagi bangsa-bangsa di wilayah Asia-Afrika dalam upaya memerdekakan diri dari belenggu penjajah, terutama yang masih belum merdeka saat itu.

Kita juga pernah dipercaya menjadi tuan rumah KTT Non Blok pada tahun 1992, dan Negara Indonesia juga termasuk perintis dan pendiri Gerakan Non Blok tersebut. Selain itu kita juga mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia (dahulu bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara/IPTN) yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang bisa dibanggakan.

Sebagai bukti rasa cinta dan bangga yang sangat mendalam terhadap wilayah tanah air, banyak di antara seniman-seniman kita yang merefleksikannya dalam bentuk syair maupun lagu. Ada lagu yang berjudul "Rayuan Pulau Kelapa"

yang diciptakan Ismail Marzuki, ada juga beberapa lagu karya Koes Plus yang diberi judul Nusantara dan Kolam Susu yang menggambarkan betapa indah dan suburnya keadaan alam Indonesia. Kesemuanya itu sudah barang tentu merupakan alasan yang sangat obyektif untuk menjadikan kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Perasaan bangga sebagai bangsa Indonesia sudah barang tentu bukan hanya sekedar slogan belaka, akan tetapi harus dibuktikan dengan karya-karya nyata, baik dalam bentuk partisipasi dalam pembangunan maupun dalam bentuk karya-karya yang dihasilkannya.

Tugas Mandiri 8.3

Coba kalian lakukan identifikasi mengenai bentuk perilaku yang dapat kalian tampilkan sebagai wujud kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan hasil identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini.

No	Perwujudan Kebanggaan Sebagai Bangsa Indonesia
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi dinamika kehidupan bernegara dalam konsteks geopolitik Indonesia, tentunya kalian semakin paham akan pentingnya keberadaan bangsa dan negara kita bagi kehidupan kalian. Oleh karena kecintaan kepada negara harus senantiasa dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Coba kalian analisis lirik lagu “Tanah Airku” ciptaan Ibu Sud.

Tanah Airku

Tanah airku tidak kulupakan
 Kan terkenang selama hidupku
 Biarpun saya pergi jauh
 Tidakkan hilang dari kalbu
 Tanahku yang ku cintai
 Engkau ku hargai
 Walaupun banyak negeri kujalani
 Yang mashyur permai dikata orang
 Tetapi kampung dan rumahku
 Disanalahku rasa senang
 Tanahku tak kulupakan
 Engkau ku banggakan

Kalian renungkan lirik lagu tersebut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Seperti apakah keadaan Indonesia digambarkan oleh lagu di atas?
2. Mengapa kita tidak pantas melupakan tanah air tercinta Indonesia?
3. Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam lagu tersebut yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari?
4. Apa saja yang telah kalian perbuat sebagai wujud kebanggaan kalian sebagai warga negara Indonesia?

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **geopolitik, wawasan nusantara, negara kesatuan dan negara serikat**.

2. Intisari Materi

- a. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata *geo* (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata *polis* yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara; dan *teia* yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa.
- b. Konsepsi Wawasan Nusantara dibangun atas geopolitik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik/kekuasaan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia.
- c. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hakikat dari Wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.
- d. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta di antara Benua Asia dan Australia.

Penilaian Diri

Keberadaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap terjamin, apabila seluruh warga negaranya berperilaku nasionalis dan patriotik. Untuk mengukur sejauh mana kalian telah berperilaku nasionalis dan patriotik dalam kehidupan sehari-hari, isilah *daftar gejala kontinum* pelakonan dibawah ini dengan membubuhkan tanda silang (x) pada kolom:

- SI (selalu), apabila selalu melakukan sesuai pernyataan.
- Sr (sering), apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan.
- Kd (Kadang-kadang), apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan.
- TP (tidak pernah), apabila tidak pernah melakukan.

No	Sikap Prilaku	SI	Sr	Kd	TP	Alasan
1	Mencintai tanah air Indonesia kapan dan di mana pun					
2	Lebih bangga memakai produk dalam negeri daripada memakai produk luar negeri					
3	Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara					
4	Tidak cepat menyerah jika menemui kesulitan					
5	Menghargai hasil karya bangsa sendiri					
6	Belajar giat untuk menyongsong hari esok					
7	Berusaha mengatasi kesulitan dengan gigih					
8	Berani menyatakan kebenaran sekalipun pahit					
9	Bersedia membela negara jika mendapat ancaman musuh					
10	Tidak berleha-leha ketika liburan sekolah					

Apabila jawaban kalian “kadang-kadang” atau “tidak pernah” pada kolom perilaku-perilaku tersebut di atas, kalian sebaiknya mulai mengubah sikap dan perilaku kalian agar menjadi lebih baik.

Praktik Belajar Kewarganegaraan

Mari Menganalisis Kasus

Indonesia pernah mengalami persengketaan dengan Malaysia yang berkaitan dengan hak penguasaan atau kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan, serta perselisihan di Blok Ambalat. Berkaitan dengan hal tersebut:

1. Coba kalian uraikan kronologi terjadi persengketaan tersebut baik yang berkaitan pulau Sipadan dan Ligitan maupun di Blok Ambalat.
2. Apakah persengketaan tersebut dapat mengancam keutuhan wilayah negara kita? Berikan alasanmu.
3. Apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi persengketaan tersebut? Bagaiman hasilnya?
4. Bagaimana perasaanmu ketika tahu bahwa pada akhirnya Pulau Sipadan dan Ligitan lepas ke tangan Malaysia?
5. Apa penyebab lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan lepas ke tangan Malaysia?
6. Apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia baik pemerintah maupun rakyat Indonesia supaya peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan lepas ke tangan Malaysia tidak terulang kembali?

Uji Kompetensi Bab 8

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Apa yang dimaksud dengan geopolitik?
2. Bagaimana konsep dasar geopolitik Indonesia?
3. Apa makna wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia?
4. Bagaimana perwujudan wawasan nusantara sebagai konsep geopolitik Indonesia.
5. Mengapa konsep federalisme tidak cocok diterapkan di Indonesia?
6. Apa saja yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia?
7. Bagaimana caramu menunjukkan kebanggaan sebagai warga Negara Indonesia?

BAB

9

Mencermati Potret Budaya Politik Masyarakat Indonesia

Akhirnya, kalian telah sampai pada materi pembelajaran bab terakhir di kelas XI. Tentunya pengalaman belajar kalian sudah semakin lengkap setelah mempelajari delapan bab sebelumnya. Selain itu, kalian juga semakin kompeten. Semua itu harus kalian jadikan modal untuk mempelajari materi pembelajaran pada bab terakhir ini. Supaya kalian dipermudah dalam memahami materi pembelajaran pada bab ini, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta jangan lupa senantiasa bersyukur atas setiap anugerah yang diterima.

Pada bab ini kalian akan diajak untuk mempelajari lebih jauh tentang budaya politik masyarakat Indonesia. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan pengertian budaya politik; menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia; mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik; dan menampilkan peran serta dalam budaya politik partisipan.

Sebagai langkah awal untuk mempelajari materi pada bab ini, coba kalian amati gambar 9.1 di bawah ini.



Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 9.1 Musyawarah antar anggota masyarakat.

Apa yang ada dibenak kalian ketika melihat peristiwa pada gambar di atas? Adakah pengaruh budaya dalam aktifitas tersebut? Jika kalian cermati dengan seksama gambar di atas, dapat dikatakan bahwa budaya mempunyai pengaruh yang kuat dalam setiap aktifitas masyarakat dalam segala hal. Aktifitas suatu kelompok masyarakat selalu menggambarkan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Ketika kalian bertemu dengan seseorang dari kelompok masyarakat yang berbeda dengan kalian, maka secara langsung kalian akan bisa menyimpulkan budaya dari masyarakat tersebut, karena pada hakekatnya kalian tengah beraktifitas dengan budaya yang melekat dalam diri anggota masyarakat tersebut. Mengapa bisa demikian?

Kebudayaan tercermin salah satunya dalam perilaku manusia pada berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek politik. Dalam kehidupan politik kebudayaan tercermin dalam konsep budaya politik. Pada dasarnya kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya, sehingga setiap masyarakat mempunyai budaya politik yang berbeda pula satu sama lainnya.

A. Hakikat Budaya Politik

1. Pengertian Budaya Politik

Sebelum mendapatkan materi bab ini, apakah kalian pernah mendengar istilah budaya politik? Jika belum, melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kalian akan diperkenalkan dengan istilah *budaya politik*. Apa sebenarnya budaya politik itu?

Istilah budaya politik merupakan alih bahasa dari istilah *the political culture*. Sebagai suatu konsep, istilah ini diperkenalkan oleh Gabriel A. Almond dalam tulisannya yang berjudul *Comparative Political System* pada tahun 1956. Tahun 1960-1970, Almond mengembangkan konsep budaya politik bersama Sidney Verba, mereka menghasilkan sebuah buku yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu politik, yaitu *The Civic Culture*. Buku ini berisikan hasil penelitian Almond dan Verba mengenai budaya politik di lima negara, yaitu Amerika, Jerman, Inggris, Italia dan Meksiko. Para pakar politik di Indonesia menerjemahkan konsep *civic culture* menjadi budaya politik atau kebudayaan politik.

Pada umumnya budaya politik diartikan sebagai pandangan politik yang mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang. Dengan kata lain, budaya politik merupakan faktor yang mempengaruhi pola pengambilan keputusan-keputusan politik baik oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah. Nah, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah agama, suku bangsa, sejarah, dan status sosial.

Makna lain dari budaya politik dikemukakan oleh Almond dan Powell dalam bukunya yang berjudul *Comparative Politics: A Developmental Approach* (1966:50) menyatakan bahwa budaya politik merupakan suatu konsep yang terdiri atas sikap, nilai-nilai dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota

masyarakat termasuk pola-pola kecenderungan khusus serta pola-pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok-kelompok masyarakat. Sedangkan Jack C. Plano dalam *Kamus Analisa Politik* (1994:166), menyimpulkan bahwa budaya politik merupakan kumpulan pengetahuan yang membentuk pola tingkah laku terhadap pemerintah dan sistem politik dari suatu masyarakat. Ia acapkali diartikan sebagai tingkah laku politik dalam dimensi psikologis misalnya pada keyakinan, perasaan dan orientasi evaluatif. Budaya politik merupakan produk pengalaman historis yang memperlancar proses sosialisasi setiap individu.

Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur yang membangun pengertian budaya politik, yaitu:

- 1) Orientasi masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintah, yang mencakup:
 - a) Orientasi yang bersifat *kognitif*. Orientasi ini menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, seperti tentang ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai dan sebagainya.
 - b) Orientasi yang bersifat *afektif*. Orientasi ini menyangkut ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politiknya.
 - c) Orientasi yang bersifat *evaluatif*. Orientasi ini menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu di dalamnya.
- 2) Menekankan pada dimensi psikologis dan bersifat subjektif
- 3) Akan membentuk sikap dan perilaku politik yang khas sesuai dengan budaya politik yang melekat

Tugas Mandiri 9.1

Berikut ini beberapa contoh dari nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Coba kalian perhatikan dengan seksama nilai-nilai manakah yang termasuk nilai budaya politik. Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang disediakan dan berikan alasanmu.

No	Pernyataan	Budaya Politik		Alasan
		Ya	Bukan	
1	Tidak boleh melangkahi kakak dalam melangsungkan pernikahan.			
2	Merasa sedih ketika melihat para pejabat negara dipenjara karena korupsi.			
3	Bekerja giat supaya pimpinan senang.			
4	Memilih partai politik yang sama dengan pimpinan supaya dinaikkan pangkat.			

No	Pernyataan	Budaya Politik		Alasan
		Ya	Bukan	
5	Sebelum tidur hendaknya berdoa terlebih dahulu.			
6	Mengawasi jalannya pemerintahan karena merupakan tanggung jawab setiap warga negara.			
7	Memberikan tanggapan terhadap penjelasan guru supaya mendapatkan perhatian yang lebih.			
8	Mengikuti pemilihan umum supaya tidak dianggap sebagai warga negara yang tidak bertanggung jawab.			
9	Kebijakan pemerintah tidak perlu dikontrol karena kita hanyalah rakyat biasa yang tidak mempunyai kekuasaan apapun.			
10	Demonstrasi mengkritisi kebijakan pemerintah.			

Berdasarkan contoh di atas, kalian dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang termasuk budaya politik. Jika kalian telah berhasil mengidentifikasinya, kalian akan mudah menggambarkan makna budaya politik itu. Nah, sekarang coba pemikiran kalian lebih difokuskan kepada negara kita tercinta, Indonesia. Kalian rumuskan sendiri makna budaya politik Indonesia.

Budaya politik Indonesia adalah :

.....

.....

.....

.....

.....

2. Klasifikasi Budaya Politik

Budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat tentu saja sangat beragam. Hal ini dikarenakan orientasi dan peranan yang dimiliki oleh setiap masyarakat pun beragam. Di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian akan menemukan beberapa perilaku dalam kegiatan politik yang menggambarkan orientasi dan peranan suatu kelompok masyarakat sebagai berikut:

- a. Dalam Pemilihan Umum, tidak menutup kemungkinan kalian akan menemukan orang yang mengaku memilih partai tertentu karena diberi uang oleh pengurus partai yang bersangkutan. Atau memilih partai yang sama dengan atasan supaya dinaikkan pangkat.
- b. Ada orang yang selalu mengkritisi kebijakan pemerintah dan selalu memberikan masukan kepada pemerintah.
- c. Ada juga orang hanya peduli pada kepentingan daerah asalnya, dia sama sekali tidak memperhatikan kepentingan bangsa dan negara.
- d. Ada pula orang yang masa bodoh atau tidak peduli dengan berbagai kegiatan politik yang berlangsung di negaranya.

Keempat contoh di atas merupakan cerminan dari budaya politik suatu masyarakat. Budaya politik masyarakat merupakan gambaran orientasi dan peranan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan politik. Berkaitan dengan hal tersebut, Morton Davies sebagaimana dikutip oleh Rusadi Kantaprawira dalam bukunya yang berjudul *Sistem Politik Indonesia* (2004:30), membagi budaya politik ke dalam tiga tipe, yaitu *budaya politik parokial*, *subjek (kaula)* dan *partisipan*. Untuk lebih jelasnya berikut ini dipaparkan penjelasan ketiga tipe budaya politik tersebut.

a. **Budaya Politik Parokial (*parochial political culture*)**

Di dalam kepustakaan-kepustakaan politik, budaya politik parokial sering diartikan sebagai budaya politik yang sempit. Dikatakan sempit karena orientasi individu atau masyarakat masih sangat terbatas pada ruang lingkup yang sempit. Orientasi dan peranan yang dimainkan masih terbatas pada lingkungan atau wilayah tempat ia tinggal. Dengan kata lain, persoalan-persoalan di luar wilayahnya tidak diperdulikannya.

Menurut Rusadi Kantaprawira, budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas yaitu belum adanya spesialisasi tugas atau peran, sehingga para pelaku politik belum memiliki peranan yang khusus. Dengan kata lain, satu peranan dilakukan bersamaan dengan peranan yang lain. Misalnya, aktifitas dan peranan

Info Kewarganegaraan

Orientasi politik merupakan kecenderungan politis dari seorang individu atau masyarakat yang akan menentukan perilaku politik individu atau masyarakat tersebut di dalam sistem politik yang sedang berlangsung. Kecenderungan ini diciptakan oleh sistem nilai internal (tradisi, sejarah, motif politik, norma, emosi dan simbol) dan pengaruh eksternal (hukum, kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan pemerintah atau sebagainya).

pelaku politik dilakukan bersamaan dengan perannya dalam bidang kehidupan lainnya seperti bidang ekonomi dan agama.

Di dalam budaya politik parokial, masyarakat tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik secara sepenuhnya. Adapun yang menonjol dalam budaya politik parokial adalah adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kekuasaan politik di dalam masyarakat yang dipegang oleh kepala adat atau kepala suku. Selain sebagai pemimpin politik, kepala adat atau kepala suku berperan juga sebagai pemimpin agama, dan pemimpin sosial.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam budaya politik parokial tidak dijumpai spesialisasi tugas dan peran dalam kegiatan politik. Kalaupun mungkin ada, dalam intensitas atau kadar yang masih rendah, sehingga tingkat partisipasi politik masyarakatnya pun masih rendah.

b. Budaya Politik Subjek (*subject political culture*)

Tipe budaya politik ini agak lebih baik dari tipe pertama. Masyarakat atau individu yang bertipe budaya politik subjek telah memiliki perhatian, dan minat terhadap sistem politik. Hal ini diwujudkan dengan berbagai peran politik yang sesuai dengan kedudukannya. Akan tetapi peran politik yang dilakukannya masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat. Individu atau masyarakat hanya menerima aturan tersebut secara pasrah. Tidak ada keinginan atau hasrat untuk menilai, menelaah atau bahkan mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam budaya politik subjek, individu atau masyarakat berkedudukan sebagai kaula atau dalam istilah masyarakat Jawa disebut *kawula gusti*, artinya sebagai abdi/pengikut setia pemerintah/raja yang posisinya cenderung pasif. Mereka menganggap bahwa dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau merubah sistem politik. Oleh karena itu mereka menyerah dan turut saja kepada semua kebijaksanaan dan keputusan para pemegang kekuasaan dalam masyarakatnya.

c. Budaya Politik Partisipan (*participant political culture*)

Budaya politik partisipan merupakan tipe budaya politik yang ideal. Dalam budaya politik partisipan individu atau masyarakat telah memiliki perhatian, kesadaran, minat serta peran politik yang sangat luas. Ia mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (yang berupa pemberian tuntutan dan dukungan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (pelaksana, penilai dan pengkritisi setiap kebijaksanaan dan keputusan politik pemerintah).

Kondisi yang diciptakan oleh budaya politik partisipan adalah kondisi masyarakat yang ideal dengan tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi. Akan tetapi, hal tersebut dapat terjadi apabila diupayakan secara optimal oleh segenap lapisan masyarakat dan pemerintah melalui berbagai kegiatan yang positif.



Sumber: www.kompas.com

Gambar 9.2 Aksi unjuk rasa.

Amatilah gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini.

1. Apa yang menyebabkan terjadinya kegiatan tersebut?
2. Menurut pendapatmu, apa tujuan dilakukannya kegiatan tersebut?
3. Apakah kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk budaya politik? Berikan alasanmu.

Daya kritis masyarakat sudah sepatutnya dibangun dan disempurnakan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daya kritis masyarakat yang sangat tinggi, akan menjadi alat kontrol yang efektif terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemegang kekuasaan. Dengan demikian, akan tercipta kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh terhadap aspirasi, keinginan dan kepentingan masyarakat.

Pada kenyataannya, ketiga budaya politik sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat berdiri sendiri. Tipe budaya politik yang satu tidak dapat menggantikan tipe budaya politik lainnya. Almond dan Verba dalam bukunya yang berjudul *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik di Lima Negara* (1990:26 - 31) menyimpulkan bahwa budaya politik warga negara adalah budaya politik campuran yang didalamnya banyak individu yang aktif dalam politik, tetapi banyak pula yang mengambil peranan sebagai subjek yang pasif. Budaya politik campuran ini menurut Almond dan Verba, terdiri dari tiga bentuk yaitu:

- a. **Budaya politik subjek-parokial.** Dalam budaya politik ini sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan masyarakat kesukuan atau feodal, dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus.
- b. **Budaya politik subjek-partisipan.** Dalam budaya politik ini, sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi-orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian orientasi pribadi sebagai seorang aktifis. Sementara sebagian penduduk lainnya terus berorientasi ke arah struktur pemerintah

yang otoriter dan secara relatif memiliki serangkaian orientasi pribadi yang pasif.

- c. **Budaya politik parokial-partisipan.** Budaya politik ini berlaku di negara-negara berkembang yang pada umumnya masyarakat lebih berbudaya politik parokial, akan tetapi norma-norma dalam struktur pemerintahan yang diperkenalkan kepada masyarakat biasanya bersifat partisipan.

Tipe-tipe budaya politik di atas merupakan suatu sub-sistem dari kebudayaan yang berlaku universal. Sehingga tidak bisa terlepas dari pengaruh kebudayaan universal tersebut. Dengan kata lain, budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang khas.

Tugas Kelompok 9.1

Perhatikan petunjuk berikut ini.

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3-5 orang.
2. Lakukanlah wawancara dengan tokoh masyarakat di daerahmu mengenai beberapa perilaku masyarakat yang mencerminkan perwujudan budaya politik.
3. Tentukan perilaku masyarakat tersebut sesuai dengan tipe budaya politik yang telah kalian pelajari.
4. Tuliskanlah hasil wawancara tersebut ke dalam tabel di bawah ini, kemudian presentasikan di depan kelas.

No	Tipe Budaya Politik	Contoh Perilaku yang Ditampilkan
1.	Parokial	a. b. c. d. e.
2.	Kaula	a. b. c. d. e.
3.	Partisipan	a. b. c. d. e.

B. Karakteristik Budaya Politik Masyarakat Indonesia

Dari uraian di atas kalian telah mendapatkan gambaran mengenai tipe-tipe budaya politik yang berkembang di masyarakat. Nah, bagaimana dengan budaya politik masyarakat Indonesia sendiri?

Menurut Rusadi Kantaprawira dalam bukunya yang berjudul *Sistem Politik Indonesia* (2004: 35 - 38), budaya politik Indonesia sampai saat ini belum mengalami perubahan. Hal ini dapat dimengerti, karena menurut hukum-hukum perkembangan masyarakat, perubahan yang menyangkut kebudayaan cenderung berjalan lambat. Sedangkan di sisi lain, sistem politik Indonesia sudah beberapa kali berubah, yaitu dari sistem politik demokrasi liberal ke sistem politik demokrasi terpimpin dan terakhir beralih ke sistem politik demokrasi Pancasila. Budaya politik yang berlaku dalam ketiga sistem politik ini cenderung tetap. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dipaparkan kesimpulan sementara tentang budaya politik Indonesia:

a. *Budaya politik Indonesia di satu pihak masih bersifat parokial-kaula, dan budaya politik partisipan di lain pihak.* Di satu sisi rakyat Indonesia masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan menjalankan tanggung jawab politiknya, hal ini mungkin disebabkan oleh ketertutupan dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme dan primordialisme. Sedangkan di sisi lain, para elit politik menunjukkan partisipasi aktifnya dalam setiap kegiatan politik. Dengan demikian jelas terlihat bahwa budaya politik Indonesia merupakan budaya politik campuran yang diwarnai oleh besarnya pengaruh budaya politik parokial-kaula.

b. *Sifat ikatan primordial masih berakar kuat dalam masyarakat Indonesia.* Hal ini dapat dilihat melalui indikatornya berupa sikap mengutamakan kepentingan daerah, suku, dan agamanya. Misalnya, pada proses pemilihan kepala daerah, masyarakat cenderung memilih calon kepala daerah yang berasal dari daerahnya (putra asli daerah) daripada calon yang berasal dari luar daerahnya, tanpa melihat kualitas atau kemampuan yang dimilikinya.

c. *Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih memegang kuat paternalisme.* Salah satu indikatornya adalah munculnya sifat *bapakisme* atau

Info Kewarganegaraan

Pada dasarnya budaya politik Indonesia bersumber dari nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sikap asal bapak senang dalam setiap hal. Budaya tersebut saat ini sudah mulai berkurang untuk birokrasi di tingkat pusat, akan tetapi di tingkatan yang lebih bawah budaya tersebut masih berkembang. Misalnya, sebagian masyarakat cenderung memilih partai politik yang sesuai dengan pilihan atasannya dengan pertimbangan supaya mendapatkan perhatian lebih.

Uraian di atas merupakan gambaran nyata budaya politik masyarakat Indonesia saat ini. Meskipun tingkat partisipasi politik masyarakat sudah mulai meningkat, tidak berarti budaya partisipan secara murni telah terwujud, melainkan budaya tersebut merupakan campuran antara budaya politik partisipan, dengan parokial serta subjek (kaula).

Tugas Kelompok 9.2

Buatlah lima buah klipng yang memuat peristiwa-peristiwa yang merupakan perwujudan dari budaya politik Indonesia. Berikan analisis kalian pada salah satu peristiwa yang dianggap kalian paling menarik.

C. Hakikat Kesadaran Politik



1. Makna Kesadaran Politik

Tahukah kalian apa makna kesadaran politik itu? Seringkah kalian mendengar istilah tersebut? Jika kalian belum mengetahui atau belum mendengar sekalipun, dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kalian akan diperkenalkan dengan konsep kesadaran politik.

Budaya politik yang berkembang di masyarakat akan selalu berkaitan dengan kesadaran politik. Pada hakekatnya budaya politik merupakan cerminan dari kesadaran politik suatu masyarakat terhadap sistem politik yang sedang berlaku. Apa sebenarnya kesadaran politik itu?

Kesadaran politik atau dalam istilah asing disebut *political awarness*. M.Taopan dalam tulisannya yang berjudul *Kesadaran Politik* (2011) menyatakan bahwa kesadaran politik merupakan proses batin yang menampakan keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara. Kesadaran politik atau keinsyafan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat begitu kompleks dan beratnya tugas yang dipikul negara dalam hal ini para penyelenggara negara.

Kesadaran politik masyarakat tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan pemilihan umum. Akan tetapi diukur juga dari peran serta mereka dalam mengawasi atau mengoreksi kebijakan dan perilaku pemerintah selama memegang kekuasaan pemerintahan. Setiap masyarakat mempunyai kesadaran politik yang berbeda-beda. Kesadaran politik masyarakat sangat tergantung pada latar belakang pendidikannya. Masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan

tinggi cenderung mempunyai kesadaran politik yang relatif tinggi. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, maka kesadaran politiknya pun relatif rendah sehingga memerlukan pembinaan.

Nah, bagaimana cara untuk menciptakan kesadaran politik? Kesadaran politik dapat tercipta salah satunya melalui sosialisasi politik (*political socialization*). Menurut kalian, apa sebenarnya sosialisasi politik itu?

Michael Rush dan **Phillip Althoff** dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Sosiologi Politik* (2003:25), mengatakan bahwa

sosialisasi politik adalah proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sementara itu **Jack Plano** dalam bukunya *Kamus Analisa Politik* (1994), mengungkapkan sosialisasi politik sebagai suatu proses belajar di mana setiap individu memperoleh orientasi-orientasi berupa keyakinan, perasaan dan komponen-komponen nilai pemerintahan dan kehidupan politik. Dari sudut pandang masyarakat, sosialisasi politik adalah cara memelihara atau mengubah kebudayaan politik. Dengan demikian, dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik dapat diartikan sebagai proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi lain melalui berbagai media perantara seperti keluarga, sekolah, partai politik, media massa dan sebagainya supaya tercipta masyarakat yang memiliki kesadaran politik.

Apa keterkaitan antara kesadaran politik dengan sosialisasi politik? Perlu diketahui bahwa kesadaran politik pada hakekatnya merupakan keinsyafan setiap individu atau masyarakat akan pentingnya nilai-nilai politik. Nilai-nilai politik tersebut tidak diperoleh seseorang dengan sendirinya melainkan melalui proses sosialisasi politik yang didalamnya terdapat proses pembelajaran mengenai

Info Kewarganegaraan

N.Y Bull mengklasifikasikan tingkatan kesadaran sebagai berikut:

1. Kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya.
2. Kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Ini pun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi.
3. Kesadaran yang bersifat sosionomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berorientasikan pada kiprah umum atau khalayak ramai.
4. Kesadaran yang bersifat autonomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik karena didasari oleh konsep kesadaran yang ada dalam diri seseorang.

semua hal tentang politik. Dengan kata lain kesadaran politik merupakan hasil dari sosialisasi politik yang dilakukan oleh agen-agen atau lembaga-lembaga sosialisasi politik. Dengan demikian sosialisasi kesadaran politik mengandung makna *proses penyadaran seorang individu atau masyarakat untuk memiliki minat dan perhatian terhadap semua kegiatan politik yang berlangsung dalam suatu sistem politik yang berlangsung di lingkungannya yang ditunjukkan dengan berbagai partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam hal pengawasan dan pengoreksian berbagai kebijakan politik dari negaranya.*

Tugas Mandiri 9.2

Setelah membaca uraian di atas tentunya kalian telah memperoleh gambaran mengenai kesadaran politik. Coba kalian tulis dalam beberapa kalimat bagaimana kesadaran politik diri kalian saat ini. Kalian boleh meminta pendapat teman dalam menilai kesadaran politik diri kalian sendiri.

Kesadaran politik saya:

.....
.....
.....
.....
.....

2. Mekanisme Sosialisasi Budaya Politik

Pada bagian sebelumnya kalian telah dapat menyimpulkan bahwa budaya politik terbentuk melalui sosialisasi politik. Nah, tahukah kalian bagaimana mekanismenya? Penting kiranya kalian mengetahui mekanisme sosialisasi pembentukan dan pengembangan budaya politik, untuk memperkuat kesadaran politik yang telah terbentuk pada diri kalian. Pada bagian ini akan dipaparkan mekanisme proses tersebut.

Mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik sama dengan mekanisme sosialisasi politik, karena budaya politik terbentuk melalui proses sosialisasi politik. Mekanisme sosialisasi budaya politik mengandung pengertian berupa cara-cara atau teknik penanaman atau pembentukan nilai-nilai politik kepada individu atau anggota masyarakat untuk memperkuat dan mengarahkan orientasi politik yang telah ada dalam dirinya. **Robert Le Vine** sebagaimana dikutip oleh Michael Rush dan Phillip Althoff (dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sosiologi Politik, 2003:38) mengatakan terdapat tiga mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik, yaitu *imitasi, instruksi dan motivasi*. **Imitasi**, yaitu proses sosialisasi melalui peniruan terhadap perilaku yang ditampilkan individu-individu lain, dan merupakan hal yang amat penting dalam sosialisasi pada masa kanak-kanak. **Instruksi** mengacu pada proses sosialisasi melalui

proses pembelajaran baik secara formal (di sekolah), informal (pendidikan di keluarga) maupun dalam bentuk nonformal (diskusi-diskusi kelompok, organisasi dan sebagainya). Sedangkan **motivasi**, merupakan mekanisme proses sosialisasi yang dikaitkan dengan pengalaman individu pada umumnya yang secara langsung mendorong dirinya untuk belajar dari pengalaman-pengalamannya mengenai tindakan-tindakan yang sesuai dengan sikap-sikap dan pendapatnya sendiri.

Ketiga mekanisme di atas tidak bisa berjalan tanpa dibantu oleh agen-agen atau lembaga-lembaga yang bertugas menjalankan sosialisasi politik. Apa saja agen-agen sosialisasi politik itu? Berikut ini dipaparkan beberapa agen sosialisasi politik, yaitu:

a. Keluarga

Keluarga merupakan agen pertama yang sangat menentukan pola pembentukan nilai-nilai politik bagi seorang individu. Di dalam keluarga ditanamkan bagaimana menghargai kewenangan ayah dan ibu serta orang yang lebih tua. Selain itu pula ditanamkan nilai-nilai atau keyakinan politik dari orang tua baik secara langsung ataupun tidak langsung. Anak dapat mendengarkan pembicaraan orang tua mengenai partai politik atau organisasi tempat kedua orang tuanya menjalankan aktifitas politiknya, serta partai politik yang dipilih oleh orang tuanya dalam pemilihan umum terakhir. Anak juga dapat menyaksikan peristiwa-peristiwa politik yang diminati kedua orang tuanya. Misalnya, kalau orang tuanya menyukai partai politik tertentu, tentu saja atribut parpol tersebut (seperti logo, simbol, seragam, bendera atau pamflet) akan terpasang di rumah. Dari sinilah nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak dan sikap serta orientasi politik anak sudah mulai terbentuk.



Sumber: greenvation.blogspot.com

Gambar 9.3 Suasana komunikasi antara orang tua dan anak.

Sebuah keluarga yang selalu menekankan kepatuhan dan hormat kepada orang tua secara kental bahkan berlebihan, bisa jadi di dalam keluarga tersebut akan

terbentuk budaya politik parokial atau subjek. Sedangkan bila sebuah keluarga terbuka dan memberikan peluang kepada anak untuk ikut terlibat dalam diskusi keluarga dan orang tua membuka dirinya untuk dikritisi anaknya, maka bisa jadi di dalam keluarga tersebut akan terbentuk budaya politik partisipan atau budaya politik demokratik.

b. Sekolah

Ketika waktunya masuk sekolah, disadari atau tidak, anak pun belajar tentang nilai-nilai, norma dan atribut negaranya. Proses pengetahuan politik siswa mulai terbentuk semenjak Taman Kanak-Kanak. Di sekolah ada gambar presiden, wakil presiden dan tidak jarang dipasang juga gambar tokoh-tokoh yang lain. Ketika memasuki sekolah dasar sampai ke jenjang sekolah menengah (SMP/MTs dan SMA/SMK/MAK) bahkan perguruan tinggi, pemahaman nilai-nilai politik siswa terus ditingkatkan terutama melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dengan demikian siswa telah memperoleh pengetahuan wal tentang kehidupan politik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis.



Sumber: agmasu.wordpress.com

Gambar 9.4 Kerja kelompok sebagai salah satu pengembangan budaya politik di sekolah.

c. Partai Politik

Konsep partai politik tentunya sudah sering kalian dengar. Di setiap negara demokratis, tentu saja terdapat partai politik. Di Indonesia juga ada partai politik, sebelum kalian memahami makna dan fungsi partai politik, coba sebutkan partai politik di Indonesia yang menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Tuliskan jawaban kalian dalam tabel di bawah ini.

4) **Pengatur konflik.** Dengan fungsi ini partai politik berfungsi untuk mengatasi berbagai macam konflik yang muncul sebagai konsekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat persaingan dan perbedaan pendapat

Sementara itu dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- 1) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- 4) partisipasi politik warga negara Indonesia;
- 5) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Tugas Kelompok 9.3

Carilah informasi kepada pengurus partai politik yang ada di sekitar sekolah atau tempat tinggalmu mengenai bentuk sosialisasi dan rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik tersebut. Laporkan hasil wawancara secara tertulis dan berkelompok. Kemudian presentasikan di depan kelompok lainnya dan informasikan nilai yang kalian peroleh kepada orang tua masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban kalian.

d. Media Lainnya

Selain sarana keluarga, sekolah dan partai politik, sosialisasi politik juga dapat dilakukan melalui peristiwa sejarah yang telah berlangsung (perjuangan tokoh-tokoh politik pada masa lampau). Selain itu juga individu dapat memperoleh sosialisasi politik dari media massa, termasuk televisi, radio, majalah dan surat kabar, serta dapat mengikuti berbagai seminar, dialog dan debat politik yang pada hakikatnya merupakan sarana sosialisasi politik.



Sumber: Dokumen Kemdikbud

Gambar 9.5 Media cetak merupakan salah satu sarana sosialisasi budaya politik.

Melalui keluarga, sekolah, partai politik dan media lainnya, seorang individu dan kelompok masyarakat memperoleh nilai-nilai politik. Dalam sebuah sistem politik yang ditandai dengan peranan negara yang begitu dominan dalam pembentukan nilai dan norma politik, maka keyakinan dan nilai yang ditanamkan adalah keyakinan dan nilai yang diyakini oleh penguasa negara, sehingga budaya politik yang berkembang dalam sistem politik tersebut adalah budaya politik parokial-kaula. Sebaliknya, dalam sebuah negara yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mandiri dalam menemukan nilai dan keyakinan politiknya, maka di negara tersebut akan berkembang budaya politik yang partisipan atau demokratis.

D. Contoh Budaya Politik Partisipan

1. Bentuk-bentuk Budaya Politik Partisipan

Dari ketiga tipe budaya politik yang diuraikan pada bagian sebelumnya, budaya politik partisipan mempunyai pengaruh yang teramat penting dalam pembangunan politik suatu negara. Budaya politik partisipan merupakan tipe budaya politik ideal, di mana dalam budaya politik ini orientasi politik rakyat tidak hanya bersifat kognitif atau afektif saja, tetapi sudah merupakan orientasi politik yang bersifat evaluatif yang ditandai dengan dimilikinya kemampuan rakyat dalam menilai dan mengontrol semua kebijakan dari para pemegang kekuasaan

Pada hakikatnya membicarakan topik budaya politik partisipan sama dengan membahas konsep partisipasi politik. Oleh karena itu dalam bagian ini, yang akan kalian kaji adalah konsep partisipasi politik. Pada bagian ini kalian akan diajak lebih memperdalam konsep partisipasi politik tersebut.

Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang/sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Partisipasi politik mengandung sasaran yang ingin dituju, yaitu proses pembuatan keputusan politik. Dengan kata lain, partisipan (orang yang berpartisipasi politik) bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil agar keputusan itu menguntungkannya atau tidak merugikannya.

Apabila kalian telaah kembali berbagai pendapat dari para sarjana politik di atas, terdapat suatu kesamaan dalam merumuskan pengertian partisipasi politik. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya partisipasi politik itu merupakan kegiatan politik yang dilakukan oleh warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah.

Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya atau tidak merugikannya.

Kemudian apa saja bentuk budaya politik partisipan itu? Budaya politik partisipan yang diwujudkan melalui partisipasi politik dapat

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Partisipasi politik yang ditampilkan masyarakat Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila terutama sila keempat yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, yang diantaranya menekankan bahwa:

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

terwujud dalam berbagai bentuk. Samuel Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya yang berjudul *Partisipasi Politik; Tak Ada Pilihan Mudah* (1984) berhasil mengidentifikasi empat bentuk partisipasi politik, yaitu:

1) *Kegiatan pemilihan*, yang mencakup memberikan suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau melakukan tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.



Sumber: www.setkab.go.id

Gambar 9.6 Pemilu merupakan salah satu bentuk budaya politik partisipan.

2) *Lobbying*, yaitu upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Misalnya, *lobbying* yang dilakukan oleh anggota DPR, atau yang dilakukan tokoh masyarakat kepada

- pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan di daerahnya.
- 3) *Kegiatan organisasi*, yang menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi dengan tujuan utamanya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.
 - 4) *Mencari koneksi*, yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat yang hanya dirasakan oleh satu orang atau beberapa orang saja.
 - 5) *Tindakan kekerasan*, yaitu upaya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap pejabat pemerintahan atau harta benda. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (dalam bentuk kudeta dan pembunuhan), mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (dalam bentuk huruhara dan pemberontakan, atau mengubah seluruh sistem politik (dalam bentuk revolusi). Kekerasan hanya dilakukan setelah tertutupnya kesempatan berpartisipasi politik secara damai.

2. Penerapan Prinsip Partisipasi Warga Negara dalam Kehidupan Politik

Setiap warga negara mempunyai peran dan kedudukan penting dalam kehidupan politik di negaranya. Kalian tentunya mempunyai peranan yang sangat besar dalam mendorong kemajuan negara kita tercinta. Hal itu salah satunya dapat diwujudkan dengan menampilkan peran aktif dalam kehidupan politik yang dapat kalian tampilkan mulai dari lingkungan sekolah, masyarakat serta lingkungan bangsa dan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Coba kalian tuliskan bentuk peran aktif dalam kehidupan politik yang dapat kalian tampilkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan negara.

No	Lingkungan	Bentuk Aktifitas
1.	Keluarga	a. b. c. d. e.
2.	Sekolah	a. b. c. d. e.
3.	Masyarakat	a. b. c. d. e.

No	Lingkungan	Bentuk Aktifitas
4.	Negara	a. b. c. d. e.

Tugas Kelompok 9.4

Diskusikanlah dengan teman sebangku.

1. Mengapa akhir-akhir ini partisipasi politik warga negara dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah cenderung menurun?
2. Apa saja yang menjadi penyebabnya?
3. Bagaimana cara untuk meningkatkan kembali partisipasi warga negara dalam pemilihan kepala daerah?

Refleksi

Setelah mempelajari materi tentang budaya politik pada bab ini, tentunya kalian semakin memahami bahwa dalam budaya politik yang berkembang pada masyarakat terdapat nilai-nilai atau perilaku yang tentunya sering kalian lakukan. Coba kalian renungkan perilaku kalian yang berkaitan dengan budaya politik terutama yang berkaitan dengan partisipasi politik. Uraikanlah secara singkat dalam satu paragraf, partisipasi politik yang pernah kalian tampilkan dalam kehidupan sehari-hari.

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **budaya politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik.**

2. Intisari Materi

- a. Istilah budaya politik merupakan alih bahasa dari istilah *the political culture*. Budaya politik masyarakat merupakan gambaran orientasi dan peranan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan politik.
- b. **Almond** dan **Powell** membagi budaya politik ke dalam tiga tipe, yaitu *budaya politik parokial, subjek (kaula)* dan *partisipan*.

- c. Budaya politik Indonesia sampai saat ini belum mengalami perubahan. Hal ini dapat dimengerti, karena menurut hukum-hukum perkembangan masyarakat, perubahan yang menyangkut kebudayaan cenderung berjalan lambat. Sedangkan di sisi lain, sistem politik Indonesia sudah beberapa kali berubah, yaitu dari sistem politik demokrasi liberal ke sistem politik demokrasi terpimpin dan terakhir beralih ke sistem politik demokrasi Pancasila..
- d. Sosialisasi kesadaran politik mengandung makna berupa proses penyadaran seorang individu atau masyarakat untuk memiliki minat dan perhatian terhadap semua kegiatan politik yang berlangsung dalam suatu sistem politik yang berlangsung di lingkungannya yang ditunjukkan dengan berbagai partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam hal pengawasan dan pengoreksian berbagai kebijakan politik dari negaranya.
- e. Budaya politik partisipan yang diwujudkan melalui partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Samuel Huntington dan Joan M. Nelson berhasil mengidentifikasi empat bentuk partisipasi politik, yaitu: *kegiatan pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, mencari koneksi, dan tindakan kekerasan*.

Penilaian Diri

Cermatilah beberapa contoh perilaku di bawah ini. Kemudian berikan penilaian atas perilaku tersebut sesuai dengan kenyataan yang kalian alami dengan cara membubuhkan tanda checklist (√) pada kolom:

- a. SI (selalu), apabila selalu melakukan sesuai pernyataan.
- b. Sr (sering), apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan.
- c. Kd (Kadang-kadang), apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan.
- d. TP (tidak pernah), apabila tidak pernah melakukan.

No	Perilaku	SI	Sr	Kd	TP	Alasan
1	Mengemukakan pendapat dalam proses pembelajaran.					
2	Mengajukan pertanyaan dalam proses pembelajaran.					

No	Perilaku	Sl	Sr	Kd	TP	Alasan
3	Menghargai teman yang sedang mengemukakan pendapat.					
4	Menghindari perbedaan pendapat dengan teman dan guru.					
5	Melakukan sesuatu karena kesadaran diri bukan ingin mendapatkan pujian dan penghargaan.					
6	Bangga sebagai warga negara Indonesia.					
7	Mengerjakan tugas dengan penuh kesadaran.					
8	Membuang sampah pada tempatnya.					
9	Mengikuti upacara dengan penuh perhatian dan khidmat.					
10	Mematuhi setiap tata tertib sekolah.					

Apabila jawaban kalian “kadang-kadang”, atau “tidak pernah” pada kolom perilaku-perilaku tersebut di atas, kalian sebaiknya mulai mengubah sikap dan perilaku kalian agar menjadi lebih baik.

Praktik Belajar Kewarganegaraan

Mari Berdebat

Aturan Main

1. Kelas dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu kelompok yang pro dan kontra
2. Masalah yang diperdebatkan adalah *Demonstrasi sebagai salah cara efektif penyampaian aspirasi rakyat.*
3. Salah seorang siswa berperan sebagai moderator yang bertugas memimpin jalannya perdebatan.
4. Perdebatan berlangsung dalam dua tahap, dimana setiap kelompok berganti peran (dari pro ke kontra atau sebaliknya) dalam tahap berikutnya dengan masalah yang diperdebatkan tetap sama.
5. Waktu berdebat selama 45 menit setiap tahap, dengan perincian waktu:
 - a. 10 menit pemaparan kelompok pro
 - b. 10 menit sanggahan kelompok kontra
 - c. 7,5 menit jawaban kelompok pro
 - d. 7,5 menit sanggahan kelompok kontra
 - e. 5 menit kesimpulan kelompok pro

- f. 5 menit kesimpulan kelompok kontra
6. Argumentasi yang dilontarkan harus bersifat ilmiah dan didasari oleh fakta-fakta yang mendukung.
7. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain
8. Tidak boleh berkata-kata kasar pada lawan debat.
9. Selamat berdebat...

Uji Kompetensi Bab 9

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara jelas dan akurat dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab.

1. Apakah yang dimaksud budaya politik? Jelaskan.
2. Deskripsikan secara singkat budaya politik yang berkembang pada masyarakat Indonesia pada umumnya.
3. Mengapa suatu tipe budaya politik tidak dapat berdiri sendiri?
4. Apakah yang dimaksud dengan kesadaran politik? Jelaskan.
5. Apakah yang dimaksud dengan sosialisasi politik? Jelaskan.
6. Jelaskan keterkaitan antara kesadaran politik dengan sosialisasi politik.
7. Berilah contoh perilaku budaya politik partisipan yang berkembang di daerahmu.

INDEKS

A

Ancaman 19 20 21 22 23 24 25 27 28 30 31 33 34 35 36 40 50 61

B

Bangsa 10 13 18 33 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 56 57 58 59 60 61
62 64 67 71 77 78 82

Budaya politik 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 76 79 80 83 84 86

D

Demokrasi 19 31 32 71 78 84

E

Ekstrimisme

G

Gangguan 20 22 23 36

Geopolitik 41 42 43 44 45 46 47 59 60 62

Globalisasi

H

Hak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 12 14 15 16 17 28 29 31 32 43 54 62 48 71 78 80

Hak asasi manusia 2 3 4 10 17 31

Hak konstitusional 3 4 14

Hambatan 11 25 36 20 26

Hedonisme 27

Ideologi 19 23 24 31 35 36 40 44 48 50 57

Individu 3 19 24 27 39 40 47 65 67 68 69 73 74 75 78 79 80 84

Individualisme 27

Integrasi nasional 19 20 29 30 34 35 36 40

K

Kebudayaan 19 34 47 64 70 71 73 84

Kesadaran politik 84 86 72 73 74 83

Kewajiban 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 28 29 32 50 48 78 80

Kewajiban asasi 7 14 17

Kewajiban konstitusional 14

Komunisme 19

INDEKS

L

Liberalisme 19 23 24

N

Negara Kesatuan Republik Indonesia 21 28 29 31 36 46 52 53 54 55 61 77

O

Orientasi politik 67 74 75 79

P

Partisipasi politik 68 72 78 79 80 81 82 83 84

Politik 3 22 24 25 30 31 32 35 36 42 43 48 49 50 55 57 60

R

Rakyat 4 10 19 26 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 45 49 50 53 54 66 67 70
77 79 85

Republik 2 3 4 5 8 9 10 17 21 28 29 30 31 36 41 46 47 48 52 53 54 55 56 60
61 77

S

Sabotase 20 22

Sosialisasi politik 73 74 75 77 78 86

Spionase 20 22

T

Tantangan 1 19 36 40

Terorisme 22 27 30

W

Wawasan nusantara 46 47 50 57 60 62

GLOSARIUM

ancaman setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa

bangsa kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara

budaya politik konsep yang terdiri atas sikap, nilai-nilai dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat termasuk pola-pola kecenderungan khusus serta pola-pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok-kelompok masyarakat

demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat

ekstrimisme sikap keras mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, walaupun melanggar ketentuan-ketentuan dasar negara

gangguan segala upaya yang ditujukan untuk menghambat proses pencapaian suatu tujuan

geopolitik ajaran yang berpendapat bahwa politik yang dijalankan suatu negara bertalian erat dengan sifat-sifat geografis daerah yang didiaminya

globalisasi proses mendunia

hak segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

hak asasi manusia hak dasar yang melekat dalam diri manusia sebagai anugerah tuhan yang maha esa

hak konstitusional hak dasar setiap warga negara yang secara tegas tercantum dalam konstitusi/undang-undang dasar

hambatan sesuatu yang tidak menyerang tapi mempengaruhi pencapaian tujuan

hedonisme pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan hidup utama

ideologi kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup

individu manusia sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan

individualisme faham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain

integrasi nasional usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional

kapitalisme sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber dari modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas (*free fight liberalism*)

kebudayaan semua hasil karya, rasa dan cipta manusia

kesadaran politik keinsyafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara

kewajiban segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu

kewajiban asasi kewajiban dasar manusia

kewajiban konstitusional kewajiban dasar warga negara yang secara tegas diatur dalam konstitusi/undang-undang dasar

komunisme faham yang menghendaki adanya masyarakat yang tanpa kelas

liberalisme faham yang menghendaki pemberian kebebasan yang luas kepada manusia

negara suatu organisasi kemanusiaan atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama

negara kesatuan negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan

negara serikat merupakan negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan. namun tiap negara bagian punya kedaulatan ke dalam untuk mengatur wilayahnya masing - masing. tiap negara bagian punya uud sendiri, kepala negara, dan badan perwakilan. kekuasaan pemerintah pusat menyangkut urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan, keuangan, dan peradilan.

nilai harga; sesuatu yang dianggap berharga oleh manusia

norma aturan yang menjadi pedoman setiap orang yang meliputi segala macam peraturan-peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan

orientasi politik arah sikap politis dari seorang individu atau masyarakat yang akan menentukan perilaku politik individu atau masyarakat tersebut di dalam sistem politik yang sedang berlangsung

partisipasi politik keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

politik strategi; siasat; berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara

rakyat kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah negara

ratifikasi pengesahan perjanjian internasional

republik bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden

sabotase menghalangi prosedur dan merusak kelancaran kerja

sosialisasi politik proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi lain melalui berbagai media perantara seperti keluarga, sekolah, partai politik, media massa dan sebagainya supaya tercipta masyarakat yang memiliki kesadaran politik

spionase penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi serta data politik negara lain; segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan memata-matai pihak lain.

strategi nasional pengetahuan tentang penggunaan kekuatan nasional (kekuatan militer dan non militer) untuk mencapai tujuan nasional

tantangan sesuatu yang tidak membahayakan bersifat pasif, tapi harus diwaspadai untuk menjaga kestabilan

terorisme praktek-praktek tindakan terror yang biasanya menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu

wawasan nusantara cara pandang dan sikap bangsa indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan pancasila dan uud negara republik indonesia tahun 1945

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. 2008. *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Almond, Gabriel A dan Bingham Polwell Jr. 1966. *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Boston: Little Brown
- Almond, Gabriel A dan Sydney Verba. 1990. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Bumi Aksara
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis*. [Online]. Tersedia: <http://www.jimly.com>. Html [27 April 2008] .
- Bakry, Noor Ms. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Budimansyah, Dasim. 2002. *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung: Ganesindo
- Busroh, Abu Daud. 2009. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Gaffar, Affan. 2004. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Huntington, Samuel P dan Joan M. Nelson. 1984. *Partisipasi Politik; Tak Ada Pilihan Mudah*. Jakarta: Sangkala Pulsar.
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia; Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Karim, Rusli. 1986. *Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Hatta
- Kavanagh, Dennis. 1982. *Kebudayaan Politik*. Jakarta: PT Bina Aksara

- Lemhanas. 1997. *Wawasan Nusantara*. Jakarta: PT Balai Pustaka
- _____. 1997. *Ketahanan Nasional*. Jakarta: PT Balai Pustaka
- MPR RI. 2012. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- _____. 2012. *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- _____. 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- Pasaribu, Rowland Bismark F. 2013. *Kewarganegaraan*. [Online] Tersedia: <http://rowlandpasaribu.wordpress.com>. Html [2 Oktober 2013]
- Plano, Jack C. 1994. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 1998. *Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia*. [Online]. Tersedia: <http://www.mpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2008. *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2011. *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

Rush, Michael dan Phillip Althof. 2003. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sundawa, Dadang. 2007. “Kerangka Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia” dalam *Materi dan Pembelajaran PKn SD*. Jakarta: Universitas Terbuka

Syafie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama

Tanpa Nama. 2013. *Pidato Bung Karno Tanggal 1 Juni 1945*. [Online] Tersedia: <http://xa.yimg.com/kq/groups.html> [15 Oktober 2013]

Taopan, M. 2011. *Kesadaran Politik*. [Online]. Tersedia: <http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science>. Html [1 Oktober 2013]

Sumber gambar

Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

<http://antarafoto.com/peristiwa/v1369191612>. Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://theglobejournal.com/ekonomi/ditjen-pajak-40-juta-wajib-pajak-yang-belum-tunaikan-kewajiban/index.php>. Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://www.bkn.go.id/kanreg07/in/berita/233>. Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://minfaaang.blogspot.com/2011/07/>. Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://gmsrw12.blogspot.com/2010/10/>. Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://verozzaranii.blogspot.com/2012/01/>. Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://zonadamai.com/2012/02/20/>. Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://bpmkotabandaaceh.wordpress.com>. Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://www.deptan.go.id>. Diunduh tanggal 1 Februari 2014

http://id.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ratzel. Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://www.sosbud.kompasiana.com>. Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://jampismansa.blogspot.com>. Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://www.republika.co.id>. Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://www.wisatanews.com/more.php?id=1027>. Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://www.kompas.com>. Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://agmasu.wordpress.com/2012/03/06/>. Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://greenvation.blogspot.com/2011/09>. Diunduh tanggal 1 Februari 2014

<http://setkab.go.id/berita-11043>. Diunduh tanggal 1 Februari 2014